

Tokoh INDONESIA[®]

THE JOURNALISTIC BIOGRAPHY

EDISI KHUSUS ■ 03/2007 ■ Rp.12.000

com



**PROF DR KPT SINAMBELA
KUSUMONAGORO**
Peduli Gali Potensi
Kelautan melalui Pendidikan

PROF DR HASJIM DJALAL
Pikirkan Indonesia 50 Tahun
ke Depan

50



PROF DR RIZALD ROMPAS
Makna Deklarasi Djoeanda
Bagi Pembangunan
Indonesia

DRS BONAR SIMANGUNSONG
Akselerasi Pembangunan
Berorientasi Kelautan

TAHUN EMAS

DEKLARASI DJOEANDA



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MPU TANTULAR



● **PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**
**KONSENTRASI : PASAR MODAL, KEUANGAN, PEMASARAN,
SUMBER DAYA MANUSIA**

● **PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**
KONSENTRASI : HUKUM BISNIS, HUKUM TATA NEGARA



DAFTAR ISI



Perspektif
Kepedulian Membangun Potensi Kelautan Melalui Dunia Pendidikan Oleh Prof Dr Kanjeng Pangeran Tarnama Sinambela K 25

Profil
Prof Dr Kanjeng Pangeran Tarnama Sinambela Kusumonagoro, Pengusaha Bervisi Pendidikan Kelautan 35

Profil
Ir Drs. Bonar Simangunsong, SE, M.Sc, Laksamana Pertama TNI-AL (Purn), Sekretaris Bidang SDM Dewan Maritim Indonesia, Pengakselerasi Pembangunan Berorientasi Kelautan 42

Wawancara
Prof Dr Hasjim Djalal, Tokoh Hukum Laut Internasional: Pikirkan Indonesia 50 Tahun ke Depan 46

Pahlawan
Ir H Djuanda Kartawidjaja (1911-1963): Pendeklarasi Negara Kepulauan 4

Reportase
Diskusi Panel Tahun Emas Deklarasi Djuanda: Percepatan Pembangunan Berorientasi Kelautan 6

Perspektif
Makna Deklarasi Djuanda Bagi Pembangunan Indonesia Oleh Prof Dr Rizald M Rompas 17

Profil
Prof Dr Rizald M Rompas, Sekretaris Dewan Maritim Indonesia, Promotor Pembangunan Berbasis Kelautan 22



Ir H Djuanda Kartawidjaja (1911-1963)

Pendeklarasi Negara Kepulauan

Perdana Menteri Ir H Djuanda Kartawidjaja, pada 13 Desember 1957 mendeklarasikan bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan. Pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 14 Januari 1911, itu dengan kepemimpinan yang berani dan visioner mendeklarasikan bahwa semua pulau dan laut Nusantara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan (wawasan nusantara). Maka sangat bijak ketika hari Deklarasi Djuanda itu kemudian melalui Keppres No.126/2001 dikukuhkan sebagai Hari Nusantara.

Ir H Djuanda Kartawidjaja, lulusan Technische Hogeschool (Sekolah Tinggi Teknik - sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB)), yang beberapa kali menjabat menteri di antaranya Menteri Perhubungan, Pengairan, Kemakmuran, Keuangan dan Pertahanan, itu sebelumnya sangat risau melihat pengakuan masyarakat internasional kala itu yang hanya mengakui bahwa batas laut teritorial selebar 3 mil laut terhitung dari garis pantai terendah. Itu artinya



Ir H Djuanda

pulau-pulau Nusantara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan 17 Agustus 1945, adalah pulau-pulau yang terpisah-pisah oleh perairan (lautan) internasional

(bebas).

Negara-negara lain, terutama Amerika Serikat dan Australia, sangat berkepentingan mempertahankan kondisi pulau-pulau Indonesia yang terpisah-pisah itu. Tetapi PM Djuanda dengan berani mendobrak kepentingan negara-negara maju itu.

Djuanda, dengan berani mengumumkan kepada dunia, bahwa wilayah laut Indonesia tidaklah sebatas yang diatur dalam Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordonantie (ordonansi tentang laut teritorial dan lingkungan maritim) 1939, tetapi wilayah laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia.

Deklarasi itu juga menyatakan penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang.

Deklarasi itu ditentang oleh Amerika Serikat dan Australia. Namun, Djuanda dan para penerus dalam pemerintahan berikutnya, di antaranya Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja dan Prof Dr Hasyim Djalal, dengan gigih berjuang

melalui diplomasi sehingga konsepsi negara nusantara tersebut diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB, United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Dengan demikian, Indonesia menjadi negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia. Memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km² yang merupakan tiga per empat dari keseluruhan wilayah Indonesia. Di dalam wilayah laut itu terdapat sekitar 17.500 lebih pulau dan dikelilingi garis pantai sepanjang 81.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

Deklarasi Djuanda secara geopolitik memiliki arti yang sangat strategis bagi kesatuan, persatuan, pertahanan dan kedaulatan serta kemajuan Indonesia. Deklarasi Djuanda dapat disebut merupakan pilar utama ketiga dari bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga pilar utama tersebut adalah: (1) Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang merupakan pernyataan Kesatuan Kejiwaan Indonesia; (2) Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan NKRI; (3) Delarasi Djuanda 13 Desember 1957 sebagai pernyataan Kesatuan Kewilayahan Indonesia (darat, laut dan udara).

Secara geoekonomi Deklarasi Djuanda juga strategis bagi kejayaan dan kemakmuran Indonesia. Sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar dan beraneka-ragam, baik berupa sumber daya alam terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), sumber daya alam yang tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, emas, perak, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), juga energi kelautan seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut.

Abdi Negara

Ir Djuanda seorang abdi negara dan abdi masyarakat. Dia seorang pegawai negeri yang patut diteladani. Semenjak lulus dari Technische

Hogeschool (1933), dia memilih mengabdikan di tengah masyarakat dengan mengajar di SMA Muhammadiyah di Jakarta dengan gaji seadanya. Padahal, kala itu dia ditawari menjadi asisten dosen di Technische Hogeschool dengan gaji lebih besar.

Setelah empat tahun mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta, pada 1937, Djuanda mengabdikan dalam dinas pemerintah di Jawatan Irigasi Jawa Barat. Dia juga aktif sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, tepatnya pada 28 September 1945, Djuanda memimpin para pemuda mengambil-alih Jawatan Kereta Api dari Jepang. Disusul pengambilalihan Jawatan Pertambangan, Kotapraja, Keresidenan dan obyek-obyek militer di Gudang Utara Bandung.

Kemudian pemerintah RI mengangkat Djuanda sebagai Kepala Jawatan Kereta Api untuk wilayah Jawa dan Madura. Setelah itu, dia diangkat menjadi Menteri Perhubungan. Dia pun pernah menjabat Menteri Pengairan, Kemakmuran, Keuangan dan Pertahanan. Beberapa kali dia memimpin perundingan dengan Belanda. Di antaranya dalam Perundingan KMB, dia bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi Indonesia. Dalam Perundingan KMB ini, Belanda mengakui kedaulatan pemerintahan RI.

Djuanda sempat ditangkap tentara Belanda saat Agresi Militer II pada 19 Desember 1948. Dia dibujuk agar bersedia ikut dalam pemerintahan Negara Pasundan. Tetapi dia menolak.

Dia seorang abdi negara dan masyarakat yang bekerja melampaui batas panggilan tugasnya. Karya pengabdianannya yang paling strategis adalah Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Dia juga seorang pemimpin yang luwes. Dalam beberapa hal dia kadangkala berbeda pendapat dengan Presiden Soekarno dan tokoh-tokoh politik lainnya. Djuanda meninggal dunia di Jakarta 7 November 1963 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. ■ [ti \(tokohindonesia.com/djuanda-kartawidjaja\)](http://ti.tokohindonesia.com/djuanda-kartawidjaja)

Mangatur L Paniroy

Diskusi Panel Tahun Emas Deklarasi Djuanda

Percepatan Pembangunan Berorientasi Kelautan

Dalam rangka memperingati Tahun Emas (50 Tahun) Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957–13 Desember 2007) dan Hari Nusantara 2007, Dewan Maritim Indonesia (kini, Dewan Kelautan Indonesia) menyelenggarakan sebuah panel diskusi yang dihadiri para wartawan di Jakarta Media Center. Panel diskusi itu diharapkan dapat menyosialisasikan makna Deklarasi Djuanda bagi pembangunan Indonesia berbasis kelautan.

Dalam sebuah kesempatan ceramah, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi pernah mengungkapkan, seluruh wilayah laut Indonesia menyimpan potensi kekayaan sebesar 150 miliar dollar AS setiap tahun tetapi belum dimanfaatkan karena belum dibangun.

Panel diskusi kali ini, juga mengungkap hal yang sama dan dimaksudkan untuk mengakselerasi dan menciptakan paradigma baru pembangunan yang berbasiskan negara kepulauan. Salah satu solusi fundamental yang dibicarakan adalah percepatan pembangunan berorientasi kelautan harus dimulai melalui pembangunan pendidikan kelautan dan kemaritiman. Hal ini ditekankan mengingat sumber daya manusia Indonesia yang masih sangat terbatas di bidang kelautan.



Freddy Numberi

langsung pengelolaan Universitas Mpu Tantular (UMT) Jakarta, bertekad (punya kepedulian) membangun (mengembangkan) potensi kelautan Indonesia. Untuk mewujudkan kehendak mulia itu, Sinambela melalui UMT telah membuka Fakultas Maritim (FM-UMT) yang masih merupakan satu-satunya di Indonesia.



Jero Wacik



DISKUSI PANEL: Rizald Rompas, Bonar Simangunsong dan KP T Sinambela K ■ mti/wilson

Rencananya Fakultas Maritim UMT itu kelak akan dikembangkan menjadi Institut Kelautan Indonesia bersamaan dengan rencananya mendirikan Kota Mahasiswa Mpu Tantular terbesar di Asia Tenggara. Di lahan seluas 500 hektar terletak di Jonggol, Jawa Barat itu akan dilengkapi segala fasilitas mahasiswa, serta didirikan Pusat Riset Kelautan Indonesia. Sebuah gagasan besar untuk mengatasi ketertinggalan bangsa di berbagai bidang, termasuk dalam memanfaatkan potensi kelautan.

Diskusi Panel

Diskusi ini berlangsung di Jakarta Media Center (JMC), Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Rabu 5 Desember 2007. Dihadiri oleh Wartawan Website dan Majalah Tokoh Indonesia dan Berita Maritim.com serta lebih banyak dihadiri anggota Majelis Pers Indonesia (MPI), sebuah organisasi profesi wartawan yang menghimpun berbagai lembaga

swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pers. Menghadirkan dua tokoh kelautan nasional sebagai pembicara yakni: Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr, sehari-hari Sekretaris DMI dan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado; dan Prof. Dr. Kanjeng Pangeran Tarnama Sinambela, Ketua Yayasan Pendidikan Budi Murni dan pendiri Universitas Mpu Tantular (UMT) Jakarta, satu-satunya perguruan tinggi di Tanah Air yang membuka Fakultas Maritim (FM-UMT).

Tampil sebagai pemandu diskusi adalah Ir Drs. Bonar Simangunsong, SE, M.Sc seorang pensiunan Laksamana Pertama TNI-AL yang kini duduk sebagai Sekretaris Bidang Sumber Daya Manusia DMI. Diskusi yang mengambil tema "Makna Deklarasi Djuanda bagi Pembangunan Indonesia", dikhususkan bagi para wartawan supaya mereka memiliki pemikiran yang baru mengenai visi pembangunan

REPORTASE

nasional yang berbasiskan negara kelautan.

Kepanitiaan panel diskusi terdiri dari gabungan pegawai Sekretariat Dekin dan insan-insan pers, dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia Nomor 12 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Diskusi Panel Dalam Rangka Peringatan Hari Nusantara Tahun 2007 dan 50 Tahun Deklarasi Djuanda tertanggal 27 November 2007.

Diskusi Panel dibuka Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Ir. Jero Wacik, selaku Ketua Panitia Nasional Peringatan Hari Nusantara 2007, yang diwakili Ir. Firmansyah Rahim, MM, Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Hubungan Antar Lembaga. Menteri Jero Wacik berhalangan hadir karena sedang mengikuti konferensi PBB mengenai perubahan iklim (UNFCCC) di Denpasar, Bali. *(Menbudpar Jero Wacik adalah salah satu anggota Dekin, yang tahun ini ditunjuk sebagai Ketua Panitia Nasional Peringatan Hari Nusantara Tahun 2007 dan Peringatan 50 Tahun Deklarasi Djuanda bertemakan "Tahun Emas Deklarasi Djuanda", dan subtema "Dengan Semangat dan Kepeloporan Deklarasi Djuanda Kita Berdayakan Potensi Laut Untuk Kesejahteraan Bangsa").*

Diskusi berlangsung menarik sekali, hangat dan simpatik. Maklum, peserta terdiri dari para wartawan yang kritis dan antusias mengelaborasi berbagai persoalan seputar kelautan. Mereka berusaha keras menemukan jawaban, mengapa laut Indonesia yang begitu luas dan kaya tetapi belum terjamah secara maksimal untuk mendaftarkan kemakmuran bagi rakyat.

Bonar dalam mengantar diskusi

menghitung laut Indonesia mengandung potensi lestari senilai 150 miliar dolar AS per tahun. Sang pemandu diskusi Bonar Simangunsong, yang juga Direktur Lembaga Pendidikan Politik Negara (LPN), berhasil mengangkat sejumlah persoalan mendasar untuk dicermati secara bersama-sama baik oleh peserta diskusi maupun oleh segenap komponen bangsa.

Makna Deklarasi Djuanda menurut Bonar perlu diangkat ke permukaan supaya laut menjadi tempat ruang hidup dan ruang juang. "Jadi bukan hanya sekadar berenang dan berlayar, tapi kita bisa hidup dari laut yang kaya itu," kata pria kelahiran Medan, 24 November 1938 ini. "Kita berdiskusi mengenai Deklarasi Djuanda, sekaligus makin menyelami betapa pentingnya deklarasi itu 50 tahun yang lalu. Yaitu, bahwa laut Indonesia itu menjadi *solid continuous*, menjadi satu, sehingga tidak ada satu titik pun di Indonesia yang menjadi milik internasional, yang sebelum deklarasi atau sebelum UNCLOS 1982 internasional berhak secara bebas," ajak Bonar memulai diskusi, kemudian mempersilakan Sekretaris Dekin Prof Dr Rizald Rompas sebagai pembicara pertama.

Makna Deklarasi Djuanda

Rizald Rompas menyoroiti berbagai sebab mengapa bidang kelautan masih belum menjadi arus utama dalam setiap kebijakan pembangunan nasional. Kondisi ini ternyata sudah didesain sejak penjajahan ekonomi jaman VOC dahulu, dengan tujuan utama supaya Indonesia lumpuh dan tidak membangun kekuatan di laut.

Kepada peserta diskusi Rompas mengatakan, wartawan mempunyai peranan penting sebab apa yang

dibicarakan di ruang diskusi yang sangat sempit sekalipun, dengan ketajaman penanya, diskusi kecil akan bisa menjadi bermakna besar di ruang yang terbuka. “*Silent communication* itu lebih tajam dari informasi lewat televisi sebab televisi hanya dapat dilihat pada saat kita menonton televisi. Tetapi lewat koran di mana-mana orang membaca. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini akan membawa perubahan besar untuk pembangunan Indonesia,” ucap pria kelahiran Manado 4 Mei 1953, yang pada usia 39 tahun (tahun 1992) sudah dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Biokimia, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat, Manado.

Sedangkan pembicara kedua Kanjeng Pangeran Tarnama Sinambela Kusumonagoro adalah pengusaha, kontraktor nasional terkemuka sekaligus pionir pembuatan aspal beton *hotmix* untuk membangun jalan-jalan di Indonesia, yang akhirnya ini namanya meroket sebagai salah seorang tokoh di bidang kelautan setelah berhasil menunjukkan kepedulian yang tinggi dalam pembangunan bidang kelautan melalui sektor pendidikan. Pria Batak bergelar Kanjeng Pangeran dari Kasuhunan Surakarta ini, memaparkan beberapa rencana besarnya di masa depan antara lain mendirikan Institut Kelautan Indonesia, membangun kota mahasiswa terpadu di lahan seluas 500 hektar di kawasan Jonggol, Bogor, Jawa Barat, termasuk di dalamnya membangun pusat riset kelautan bertaraf internasional (*ocean research center*).

Apabila Fakultas Maritim UMT lebih banyak bergelut di bidang *science*, penelitian dan pemikiran bidang ilmu kelautan, bila kelak

dilengkapi Institut Kelautan Indonesia diharapkan pendidikan bidang kelautan semakin dekat ke arah aplikasi dan penerapan ilmu, penggunaan teknologi kelautan secara tepat guna, dan yang terutama lebih dekat dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Pendirian Institut Kelautan itu merupakan penajaman dari visi Fakultas Maritim-UMT untuk memberikan makna kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat.

Bila dilihat dari segi istilah, kelautan merujuk kepada laut sebagai wilayah geopolitik maupun wilayah sumber daya alam. Sedangkan maritim merujuk kepada kegiatan ekonomi yang terkait dengan perkapalan, baik armada niaga maupun militer, serta kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan itu seperti industri maritim dan pelabuhan. Pendirian institut kelautan diarahkan kepada upaya eksplorasi wilayah laut secara maksimal bagi perbaikan kehidupan.

Satukan Wilayah

Dalam pemahaman Roberto Bangun, Wakil Ketua Dewan Penasehat MPI, Djuanda adalah seorang nasionalis kebangsaan tulen yang mencintai negerinya.

Apabila Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi kunci penyatuan kejiwaan dan semangat seluruh bangsa untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yaitu Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dicetuskan satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, 18 Agustus 1945 adalah penyatuan kenegaraan, maka, Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 adalah penyatuan wilayah yang utuh sebab di dalamnya tidak ada lagi celah wilayah internasional.



Prof Dr Rizald M Rompas ■ mti/wilson

Sementara, Rizald Rompas menyebutkan, Deklarasi Djuanda bermaknakan kepeloporan Djuanda dalam perjuangannya menentang konstitusi internasional. Sebelum deklarasi, wilayah negara Indonesia adalah tinggalan Hindia Belanda yang menurut *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie (TZEMKO) 1939*, batas laut teritorial Indonesia adalah 3 mil dari pantai. Ini membuat perairan antarpulau pada waktu itu masih merupakan wilayah internasional. Dengan rejim hukum laut TZEMKO, wilayah laut Indonesia hanyalah 100.000 kilometer persegi, dan secara fisik pulau-pulau Indonesia dipisahkan oleh laut.

Kepeloporan Djuanda terbilang sangat berani sebab dideklarasikan secara sepihak, serta bertentangan pula dengan UU dan hukum internasional yang berlaku pada saat itu yang tidak mengenal subjek *archipelagic state* atau negara kepulauan. Klaim Djuanda bersama-

an pula dengan upaya Indonesia untuk memperpanjang batas laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil dari pantai. Tak mengherankan apabila Amerika Serikat dan Australia serta sebagian negara di Asia Tenggara secara tegas menentang Deklarasi Djuanda.

Konsep negara kepulauan yang diidam-idamkan Djuanda adalah anugerah yang luar biasa besar bagi bangsa ini. Anugerah itu adalah, letak geografis yang strategis terletak di antara dua benua dan dua samudera. Posisi ini membuat paling tidak 70 persen angkutan barang melalui laut dari Eropa, Timur Tengah, dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik, dan sebaliknya, harus melalui perairan Indonesia.

Pantai Indonesia sepanjang 81 ribu kilometer, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, merupakan wilayah pesisir dengan ekosistem yang secara biologis sangat kaya dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Perairan Indonesia juga menyimpan berbagai data meteorologi maritim yang amat vital dalam menentukan tingkat akurasi perkiraan iklim global.

Perairan Indonesia mengandung gejala alam bernama Arus Laut Indonesia (Arlindo), atau *the Indonesia throughflow*. Arlindo adalah arus laut besar yang permanen masuk ke perairan Indonesia dari Samudera Pasifik. Arus ini mempunyai pengaruh besar pada pola migrasi ikan pelangi dan pembiakannya, dan juga pengaruh besar pada iklim benua Australia.

Gugusan 17.508 pulau Indonesia memberikan akses pada sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wilayah wisata bahari, sumber energi alam terbarukan maupun minyak dan gas

bumi, mineral langka dan juga media penghubung antar pulau yang sangat ekonomis.

Anugerah luar biasa yang tergambarakan tersebut membuat Deklarasi Djuanda lama ditentang asing, hingga baru berhasil diterima dunia 25 tahun kemudian melalui Konvensi kedua PBB tentang Hukum Laut (*2nd United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS*) pada tahun 1992, yang mengakui konsep negara kepulauan. Untuk mencapainya Indonesia harus mengurus banyak waktu, dana, dan tenaga.

Tetapi UNCLOS baru resmi berlaku sejak tahun 1995 setelah diratifikasi oleh 60 negara. Dengan UNCLOS, Indonesia mendapat pengakuan dunia untuk menambah wilayah nasionalnya, dari sebelumnya 100.000 km² mendapat tambahan seluas 3,1 juta kilometer persegi wilayah perairan, dan ditambah lagi 2,7 kilometer persegi Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu bagian perairan internasional dimana Indonesia mempunyai hak berdaulat



Prof Dr KP T Sinambela K ■ mti/wilson

untuk memanfaatkan sumberdaya alam termasuk yang ada di dasar laut dan di bawahnya.

Belum Menjadi Mainstream

Insinyur Haji Djuanda lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 14 Januari 1911, dan meninggal dunia di Jakarta 7 November 1963.

Jasadnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Djuanda adalah Perdana Menteri Republik Indonesia ke-11 sekaligus yang terakhir, menjabat antara 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelahnya, Juanda menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja I.

Nama pahlawan nasional ini diabadikan sebagai nama bandar udara Juanda di Surabaya, Jawa Timur, karena jasanya yang sangat besar dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang internasional di Surabaya hingga terlaksana.



Ir Drs Bonar Simangunsong, SE, MSc ■ mti/ws

REPORTASE

Sejak memaklumkan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957, hingga 50 tahun kemudian, perjuangan Djuanda menjadikan laut sebagai *trigger* pembangunan masih belum bisa diterima oleh semua pihak. Kondisi kekinian masih sama saja dengan era VOC, dimana kita dicekoki terus dengan paradigma daratan. Kita disibukkan terus dengan daratan supaya lupa dan tidak ambil peduli dengan laut yang potensinya maha kaya. Jika dahulu Belanda berbuat demikian supaya mereka aman menjadikan laut sebagai media transaksi dagang ke semua benua. Untuk itu kita disibukkan di darat, bahkan antar kerajaan pesisir pada masa itu diadudomba hingga lemah.

Selain itu, pada jaman Belanda tak satupun orang Indonesia yang diangkat menjadi nakhoda kapal, dan memang tidak diijinkan, agar tak menghambat urusan dagang para negeri Belanda. Kondisi yang kurang lebih sama terus saja berlangsung hingga saat ini, kita ternabobokan dengan paradigma daratan.

Sekalipun pada Hari Nusantara 2006 lalu di Padang, Sumatera Barat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan sudah saatnya paradigma pembangunan kita bergerak dari *land base development*, realitanya, sesudah setahun, pergerakannya masih saja tersendat-sendat. Rompas menggambarkannya jalan, tetapi gerakannya jalan-jalan di tempat.

Demikian pula Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPM), di dalamnya hanya muncul satu visi kelautan itupun setelah melalui perjuangan yang luar biasa berat. Dalam RPJPM konsep awal, masalah kelautan hanya diakomodir 0,4 persen padahal

wilayah laut kita mencapai 75,3 persen dari keseluruhan wilayah.

Sebagai negara kepulauan harusnya pembangunan berangkat dari *archipelagic state*, dengan menjadikan pembangunan bidang kelautan sebagai arus utama atau *main-stream*. Namun kenyataannya, masih jauh panggang dari api. Hal ini bisa dilihat pada pola penganggaran di APBN, yang tidak mengakomodir ketentuan perjalanan dinas bila dilakukan sampai ke pulau-pulau. Pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dilakukan sampai ke pulau-pulau menjadi susah, padahal perjalanan dari ibukota provinsi atau kabupaten ke pulau harus menyewa perahu yang harganya lebih mahal dari perjalanan darat. "Tapi dalam pola penganggaran tidak masuk itu. Itu salah satu efek pola pikir kebijakan ke daratan," kata Rompas, yang mengaku turut mengalami kesulitan memberikan pertanggungjawaban anggaran sebab seringkali dia mengadakan perjalanan ke pulau-pulau kecil.

Indonesia memang menjadi seolah terlambat membangun kelautan kendati sudah 50 tahun lampau perjuangannya digaungkan oleh Djuanda, atau sudah 25 tahun UNCLOS diterima. Masyarakat Indonesia yang hidup di pulau-pulau terluar, Miangas misalnya, yang berbatasan langsung dengan Filipina, lebih senang menyebut dirinya sebagai orang Filipina daripada orang Indonesia. Selain karena mereka lebih dekat ke Filipina, kita memang kurang perhatian ke sana. Pelayaran rakyat tidak bisa menjangkau mereka karena paradigma kita masih paradigma daratan.

Untuk itulah momentum peringatan Deklarasi Djuanda menjadi penting, kata Rompas, untuk

mendorong Indonesia menjadikan bidang kelautan sebagai perhatian besar sejak sekarang. Perhatian yang besar terhadap pembangunan kelautan pastinya akan mengangkat masyarakat miskin yang umumnya kaum nelayan.

Sesuai visi dalam RPJPM kita harus bersama-sama bergandengan tangan membangun Indonesia sebagai negara kepulauan, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat, jaya dan mandiri. Seperti dikatakan Rompas, makna Deklarasi Djuanda adalah mari kita bangkitkan, kita amankan, kita manfaatkan, dan kita kelola laut Indonesia untuk kesejahteraan rakyat dan kejayaan bangsa sehingga kita dihormati dalam tata pergaulan internasional. Mari pula kita kembalikan semangat kepatriotan Djuanda memperjuangkan semuanya, supaya harkat kita di mata dunia bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dan jangan dianggap sepele.

Kata Rompas, sumberdaya alam yang melimpah mendukung semua orang Indonesia menjadikannya sebagai objek pencaharian mereka, sehingga tidak perlu mencari pekerjaan di luar negeri seperti ke Malaysia.

Peduli Pendidikan Kelautan

Sebagai pengusaha yang lincah berpikir mengenai peluang dan untung-rugi dalam berusaha, serta ditopang oleh tingginya kepedulian membangun masa depan bangsa melalui dunia pendidikan, sosok Kanjeng Pangeran Tarnama Sinambela menjadi sangat penting di tengah-tengah kancah kelautan nasional.

Saat banyak petinggi negara dan pemerintahan belum ambil peduli memanfaatkan potensi kelautan yang maha kaya, Tarnama sudah

mendirikan Fakultas Maritim di Universitas Mpu Tantular (UMT).

Sambil berusaha, Tarnama mendirikan Yayasan Pendidikan Budi Murni pada tahun 1976, mengelola jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK yang tersebar di berbagai lokasi di Jabotabek. Sebagian keuntungan bisnis biasanya disisihkan Tarnama untuk dibelikan tanah, dan di atas tanah itulah bertumbuh sekolah-sekolah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara lebih luas.

Pada tahun 1984 sesudah memiliki sembilan ribu lebih siswa di semua jenjang, Tarnama didesak oleh para kolega untuk juga mendirikan perguruan tinggi hingga teretuslah ide untuk mendirikan Universitas Mpu Tantular, disingkat UMT. Semuanya lalu berproses. Tarnama tergolong intens menggumuli UMT. Pada suatu kesempatan ia mengadakan studi banding ke luar negeri, di antaranya ke Jerman dan Amerika Serikat. Di kedua negara tersebut ia menemukan tipikal sebuah kota yang disebut Kota Mahasiswa. Pengalaman berharga itu berubah menjadi idaman hati untuk didirikan di Indonesia.

Dengan berjuang keras tak kenal lelah, Tarnama menemukan lahan seluas 500 hektar di Jonggol, Jawa Barat. Lahan ini dalam pandangannya akan menjadi kawasan yang ideal untuk merealisasikan mimpi mendirikan Kota Mahasiswa Terpadu Mpu Tantular, yang luasnya melebihi kawasan Universitas Indonesia (UI) Depok yang hanya 220 hektar.

Di kawasan Kota Mahasiswa Mpu Tantular terbesar di Asia Tenggara itu kelak akan didirikan UMT dan Institut Kelautan Mpu Tantular, pusat riset kelautan (*ocean research center*) bertaraf internasional,

REPORTASE

asrama mahasiswa, bioskop mahasiswa, perpustakaan, danau dan semua hal yang mendukung kebutuhan mahasiswa selama lima tahun menuntut ilmu hingga meraih gelar sarjana siap pakai. "Ini akan menjadi satu kota: asrama di situ, bioskop di situ, perpustakaan semua ada di situ sehingga selama lima tahun sebelum mahasiswa tamat tidak bisa keluar kota. Udaranya sangat mendukung," kata Tarnama, yang terlihat sangat berapi-api menyampaikan gagasan briliannya ini membangun pendidikan kelautan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi belum lama ini sudah menandatangani prasasti pertanda dimulainya pemancangan pertama pembangunan Kota Mahasiswa Mpu Tantular. Untuk menghormati kesediaan Pak Menteri, segenap civitas akademika UMT berkenan memberikan nama danau yang dibangun dengan danau Sentani, karena inilah nama danau yang terkenal di Papua saat ini. Bahkan, saat ini, untuk periode pertama sudah terdapat 128 orang mahasiswa UMT yang berasal dari Papua dibiayai secara bersama antara UMT dengan Pemda Papua.

Tak mengherankan apabila para wartawan peserta diskusi panel banyak mengapresiasi rencana besar Tarnama Sinambela membangun pendidikan kelautan, sama tingginya dengan apresiasi yang diberikan kepada Rizald Max Rompas.

"Kami bangga pada Yayasan Pendidikan Budi Murni dan kepada Kanjeng Pangeran Tarnama, yang telah membangkitkan paradigma baru dalam pendidikan kelautan ini. Kalau perlu, Kanjeng Pangeran Tarnama membangun pendidikan kelautan sejak SD dan SMP," ucap seorang peserta diskusi.

Demikian juga ungkapan Antony dari Peduli Lingkungan, Albiner Rajagukguk, SH, dan Dr Ir H Wahyu Pujo Haryoko, MM Ketua Umum Ijaphamba. Wahyu mengatakan, bicara kelautan, di sinilah sebetulnya kejayaan bangsa Indonesia terlihat pada sejarah Majapahit dan Sriwijaya. "Mari kita satukan semua potensi. Bukan hanya pemerintah yang harus maju, tetapi juga rakyat seperti Kanjeng Pangeran Tarnama yang membangun sedemikian hebatnya. Kita harus jadi bangsa yang terhormat di Indonesia," kata Wahyu.

Prof. Dr. M.J. Simbolon, Kepala Badan Pemantau Pembangunan MPI yang juga Direktur Lembaga Penelitian Kelautan Indonesia, justru mengajukan pertanyaan menggelitik yakni apa sarana yang sudah dipersiapkan untuk menyelamatkan kelautan Indonesia. Simanjuntak, seorang pengamat lingkungan, merasa tertarik dengan penjelasan Rizald Rompas betapa sebagian besar orang memandang sebelah mata kehidupan samudera kita. Simanjuntak juga bertanya, setelah sekian lama Departemen Kelautan dan Perikanan berdiri, apa yang dilakukan untuk membuka kedua belah mata, supaya kita tidak sebelah mata memandang.

"Ada juga yang harus kita tiru, kita anut, yaitu apa yang dilemparkan oleh Kanjeng Pangeran Tarnama dengan kampus yang begitu megah, indah. Barangkali, saatnya juga Kementerian Kelautan dan Perikanan mengambil peran untuk jempot bola. Mengapa justru UMT yang begitu dahsyat merangsang kita tadi, tidak diambil-alih oleh DKP menjadi objek pembangunan maritimnya," kata Simanjuntak.

Jaja Sukarja Ramli yang memimpin beberapa organisasi pers mengatakan, dengan melihat



HARNUS: Tiga tokoh pecinta laut ■ ti/wis

perjuangan Djuanda, ia optimis kalau kepeloporan Djuanda akan terus digaungkan serta disebarluaskan oleh pers. Andi Riswandimas dari Indonesia Maritim Watch, menyoroti soal sumber daya manusia kelautan Indonesia yang lemah. Menurutnya, dari 37 sekolah pelayaran yang ada di Jakarta, tidak semuanya mengikuti peraturan Badan Diklat Perhubungan Laut No. DL/21 Tahun 2000, yaitu Standar Minimal Untuk Membuka Diklat Kelautan.

Walau melontarkan berbagai kritik soal pembangunan kelautan yang masih jalan di tempat sehingga belum banyak memberikan manfaat kemakmuran bagi rakyat, para peserta diskusi umumnya turut menawarkan solusi sebagai jalan keluar. Seperti yang disampaikan Drs. Boyke Manangkang Nainggolan, MBA.

Khusus tentang SDM kelautan yang banyak mendapat sorotan

peserta, misalnya, Rizald Rompas mengakui kalau kita agak lemah. Kita kalah bersaing dengan kemampuan Filipina sehingga harus dipacu dengan membangun sekolah sebagai *center of excellence* supaya kita mampu bersaing di dunia. Dalam hal ini pula Rizal mengakui bahwa partisipasi swasta sangat diharapkan.

“Partisipasi swasta itu yang kita harapkan. Tapi untuk membantu, regulasi pemerintah jangan menjadi penghambat. Misalnya dia ingin mendirikan institut kelautan, jangan jadi penghambat untuk administrasi. Jangan sampai nanti ada peribahasa yang seperti dulu, kalau boleh diperlambat kenapa tidak diperlambat. Itu harus hilang,” tegas Rompas. Menurutnya, kalau ada swasta yang mau membangun dan mendirikan institut kelautan dengan riset, diberi izin, jangan diputar-putar lagi. “Kalau misalnya terjadi itu, izin yang diputar-putar lagi oleh Diknas, itu punya hak Dekin, kita laporkan ke KPK,” kata Rompas yakin.

Rizald Rompas juga memberikan apresiasi secara khusus kepada Kanjeng Pangeran Utama Sinambela yang hendak membangun Kota Mahasiswa Mpu Tantular di Jonggol, Jawa Barat. “Saya sangat mendukung ide itu, apalagi gagasan beliau adalah gagasan yang sangat besar ingin menjadikan kampus itu sebagai kampus yang terbaik di Asia Tenggara. Dan itu, kalau muncul, maka tidak akan memalukan bangsa kita. Kalau dia terbesar di Asia Tenggara paling tidak orang Malaysia, orang Filipina, akan belajar ke situ,” kata Rizald Rompas. ■ ti

Haposan Tampubolon

Reporter Saut Situmorang, Nur Azizah dan Fotografer Wilson

Pemimpin Umum/Pemred

Ch Robin Simanullang

Redaktur Eksekutif

Mangatur L Paniroy

Sekretaris Redaksi

Marjuka Situmorang

Redaktur

Dandy Hendrias, Haposan

Tampubolon, Tumpal

Siburian, Anis Fuadi,

Samsuri, HM Aulia Effendy,

Suryopranoto

Artistik

Esero Design

Fotografer

Wilson Edward

Ricky L Photo Studio

Pemimpin Perusahaan

Mangatur L Paniroy

Kuangan & Umum

Adur Nursinta Purba

Iklan

Herni Dewi Farida

Sirkulasi & Distribusi

Hotsan Bantu

Sertifikat Merek

Ditjen HAKI Dephukham

Agno: D00-02-2395

ISSN: 1908-9788**Penerbit**

PT Asasira

Alamat

GEDUNG DEWAN PERS Lt 1,

Jalan Kebon Sirih 32-34,

Jakarta Pusat 10110 Tel: 021

3483 0840 - 3219 5351 -3219

5352 - 3219 5353

In Headnews, Pracetak &**Sirkulasi:** Jalan Bukit Duri

Tanjakan IX No.26, Tebet,

Jakarta 12840 Tel: 021 8370

1736 - 98101871 Fax: 021

8378 7235 - 3219 5343

E-mail: redaksi@tokoh.net**Website:**

www.tokohindonesia.com

Kapur Sirih**Golden Jubilee**

Pembaca yang budiman! Negara kita adalah sebuah negara kepulauan (*archipelagic state*), bahkan bisa disebut negara kelautan (*ocean state*). Sebab negara kita memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km, lebih dua pertiga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di wilayah lautan yang luas itu, terdapat 17.500-an pulau dan memanjang sekitar 81.000 km bibir pantai (terpanjang kedua di dunia setelah Kanada).

Maka, sesungguhnya kekayaan terbesar kita ada di laut. Baik kekayaan dari segi geoekonomi maupun geopolitik (di antara dua benua dan dua samudera).

Dunia mengakui keberadaan NKRI sebagai negara kepulauan, melalui perjuangan panjang. Dimulai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Saat PM Ir Djuanda mengklaim secara sepihak bahwa semua pulau dan laut Indonesia satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan.

Deklarasi yang berani dan bermakna ini, tahun ini genap 50 tahun (*golden jubilee*). Hari yang juga telah ditetapkan sebagai Hari Nusantara, sejak 2001. Maka, pada Edisi Khusus kali ini kami menyajikan hasil Diskusi Panel Dewan Kelautan Indonesia dengan para jurnalis yang mencoba mengangkat dan memaknai Deklarasi Djuanda bagi pembangunan Indonesia.

Salah satu pembicara adalah seorang pengusaha yang telah membuktikan kepedulian mengoptimalkan pendayagunaan potensi kelautan melalui pendidikan. Selamat membaca!

Redaksi

Makna Deklarasi Djuanda

Bagi Pembangunan Indonesia

Oleh: Prof Dr Rizald M Rompas

Pembangunan Indonesia semata-mata untuk menyejahterakan rakyat dan kemakmuran bangsa. Secara politis percepatan pembangunan akan mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Negara Indonesia harus berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain. Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik yang memiliki kekuatan dan modal untuk kepentingan membangun sebagai negara yang kuat, jaya dan makmur.

Kekuatan yang dimiliki oleh wilayah NKRI merupakan negara yang mempunyai potensi yang sangat strategis dalam kancah perekonomian dunia dan juga mempunyai potensi sumber daya alam hayati dan nirhayati - baik di lautan, daratan dan udara yang sangat berpolah (kaya). Ke depan, unggulan wilayah tersebut dapat menjadi kendali bagi perkembangan politik dan ekonomi dunia. Unggulan wilayah tersebut antara lain:

1. Sebagai negara kepulauan,

Indonesia mempunyai posisi geo-ekonomi dan politik yang sangat strategis karena berada di lintasan perniagaan yang paling penting di dunia - di antara kawasan Atlantik dan Asia Pasifik.

2. Secara geologis Indonesia juga merupakan titik temu lempengan Eurasia dan Australasia, yang menyebabkan di Indonesia banyak ditemukan lipatan, sesar dan gunung berapi. Oleh karenanya posisi Indonesia adalah merupakan salah satu tanah yang subur, ditumbuhi hutan-hutan tropis yang salah satu terluas, sumber daya tambang mineral, sumber daya perikanan yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayatinya yang sangat luar biasa.

3. Ribuan pulau yang tersebar tersebut dihuni oleh berbagai aneka suku bangsa dan etnis, yang menjadi ciri khas Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karenanya Indonesia mempunyai keragaman aneka budaya yang sangat kaya.

4. Penduduk dengan jumlah yang besar merupakan sumber daya yang

PERSPEKTIF

potensial dan produktif bagi pembangunan nasional.

5. Perkembangan politik yang telah melalui tahap awal reformasi, telah memberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi, serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

Kesemuanya itu merupakan modal dasar yang sangat penting untuk menjadikan Indonesia di masa depan sebagai negara yang kuat, mandiri dan disegani dalam pergaulan mancanegara.

Tiga Pilar Utama

Sesungguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas tiga pilar utama yaitu:

1) Pilar yang pertama adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang menyatakan Kesatuan Kejiwaan kebangsaan Indonesia.

2) Pilar yang kedua adalah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia yang telah menjadi satu bangsa tersebut ingin hidup dalam satu kesatuan kenegaraan.

3) Deklarasi Djuanda tahun 1957, Indonesia memperjuangkan pilar yang ketiga yaitu Kesatuan Kewilayahan yaitu Kepulauan Nusantara yang merupakan kesatuan dari wilayah darat, laut antara darat termasuk dasar laut di bawahnya, udara di atasnya dan seluruh kekayaan merupakan suatu kesatuan kewilayahan yang harus diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat pasal 33 ayat (b) Undang-Undang Dasar 1945. Deklarasi Djuanda lahir berdasarkan pertimbangan: geografis, ekonomis, pertahanan, keamanan dan politis. Dengan deklarasi ini, Indonesia menyatakan bahwa teritorial negara Indonesia adalah

wilayah yang dikelilingi oleh garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau yang terluar negara Indonesia selebar 12 mil laut.

Sejarah Perjuangan Deklarasi Djuanda

Pemerintah Indonesia menyadari secara mendalam bahwa regulasi Hindia Belanda tentang luas wilayah laut negara sebagai laut teritorial hanya 3 mil dihitung dari batas garis pantai. Kalau kondisi ini tetap dipertahankan, maka wilayah perairan laut di antara kelima pulau besar Indonesia (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua) terdapat wilayah perairan internasional. Hal ini dapat mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar inilah, Indonesia secara sepihak berani mendeklarasi di mata dunia tentang penyatuan wilayah yang utuh, berani menentang aturan internasional.

Dahulunya, hukum laut internasional tidak mengenal subjek hukum "archipelago" (kepulauan) atau "archipelagic state" (negara kepulauan), yang hanya dikenal pulau saja (island). Oleh karena itu banyak negara sangat menentang gagasan tentang negara kepulauan, seperti Amerika Serikat (30 Desember 1957), Inggris, Australia, dan Belanda (3 Januari 1958) dan Selandia Baru (11 Januari 1958). Negara-negara tetangga lain pada mulanya juga ikut menentang. Deklarasi tersebut kemudian memiliki kedudukan yang lebih kuat setelah diundangkan melalui Undang-undang Nomor 4/Prp Tahun 1960.

Masalah hukum laut internasional sebenarnya sudah muncul lebih awal yaitu pada 28 September 1945, saat Presiden Amerika Serikat Harry S Truman memproklamasikan bahwa kekayaan sumber daya alam



Zona Tambahan;
b) Konvensi tentang Laut Bebas; c) Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Hayati di Laut Bebas; d) Konvensi tentang Landas Kontinen.

Dalam konferensi inilah delegasi Indonesia untuk pertama kalinya melemparkan gagasan asas negara kepulauan walaupun ditarik kembali, karena takut ditolak oleh sidang.

Pada tahun 1960 diselengga-

ROMPAS: Laut masih dipandang sebelah mata ■ mti/wilson

yang berada pada dasar laut dan tanah di bawahnya sepanjang landas kontinen yang mengelilingi pantaunya, dicadangkan untuk kepentingan dan rakyat Amerika Serikat. Batas laut teritorial tetap 3 mil laut dan hak berlayar tidak terpengaruh oleh proklamasi ini. Pengumuman tersebut telah menggugah negara-negara pantai lainnya untuk berbuat yang sama, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk diselenggarakan suatu konvensi yang akan mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah laut.

Atas dasar pentingnya tuntutan pengaturan laut, Komisi Hukum Internasional menyiapkan draf Hukum Laut untuk dibahas dalam Konferensi PBB tentang Hukum Laut yang pertama di Jenewa tahun 1958. Konferensi ini berhasil merumuskan 4 konvensi yaitu: a) Konvensi tentang laut Teritorial dan

rakan konferensi yang kedua yang diselenggarakan juga di Jenewa, yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang belum terpecahkan dalam konferensi pertama, khususnya mengenai lebar laut teritorial. Namun konferensi ini belum berhasil memecahkan lebar laut teritorial karena pada waktu itu negara-negara menetapkan lebar laut teritorial beragam dari 3 mil hingga 200 mil. Kegagalan konferensi dalam merumuskan hak-hak dan kewajiban negara atas laut antara lain dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang memungkinkan penambangan di dasar laut, ketergantungan pemasok bahan bakar minyak lewat laut. Oleh karena itu Sidang Umum PBB tahun 1970 memandang perlu untuk menyelenggarakan konferensi yang ketiga.

Konferensi ketiga diselenggarakan sebanyak 12 kali sidang dari tahun

1973 hingga tahun 1982. Sidang pertama, keempat, kelima, keenam, kesembilan, kesepuluh dan kesebelas diselenggarakan di New York. Sidang kedua di Caracas. Sidang ketiga, ketujuh, kedelapan dan kesepuluh di Jenewa, dan terakhir sidang kedua belas di Teluk Montego Jamaika. Pada sidang kesebelas di New York, dengan 136 suara setuju, 4 menentang dan 9 abstain sidang menerima Rancangan Konvensi menjadi Naskah Konvensi.

Pada sidang kedua belas naskah konvensi ditandatangani oleh 119 negara dan resmi menjadi Konvensi PBB tentang Hukum Laut Ketiga. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Conventions on the Law of The Sea/UNCLOS*) 1982 terdiri atas 320 pasal, yang disusun dalam 17 bab sbb: Bab I Pendahuluan, Bab II Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Bab III Selat yang digunakan untuk Pelayaran Internasional, Bab IV Negara Kepulauan, Bab V Zona Ekonomi Eksklusif, Bab VI Landas Kontinen, Bab VII Laut Lepas, Bab VIII Regim Pulau, Bab IX Laut Tertutup atau Setengah Tertutup, Bab X Hak Negara tak Berpantai untuk masuk ke dalam dan ke luar laut serta kebebasan melakukan transit, Bab XI Kawasan, Bab XII Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut, Bab XIII Riset Ilmiah Kelautan, Bab XIV Pengembangan dan Alih Teknologi Kelautan, Bab XV Penyelesaian Sengketa, Bab XVI Ketentuan Umum dan Bab XVII Ketentuan Penutup.

Bab Konvensi adalah sbb: Konferensi ini menetapkan bahwa lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut dan diakuinya Konsepsi Wawasan Nusantara.

Dengan persetujuan DPR RI pada 21 Desember 1985, Presiden RI mengesahkan UNCLOS 1982 melalui

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Luas wilayah laut Indonesia dan hak-haknya atas kekayaan alam di laut sejak adanya pengakuan internasional dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 menjadi semakin luas; semula hanya sekitar 3 juta km² menjadi hampir 5,8 juta km² (termasuk perairan nusantara).

Dengan mengesahkan Konvensi Hukum Laut tersebut, pemerintah Indonesia di samping mempunyai hak juga mempunyai kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain: menetapkan laut teritorialnya, pengaturan lalu lintas laut damai, pengaturan alur laut kepulauan dan skema pemisah di laut teritorial dan perairan nusantara, pengaturan kegiatan riset dan survey, dll.

Adanya perjuangan yang gigih dengan mengorbankan waktu, tenaga dan dana cukup besar, akhirnya 25 tahun kemudian, yaitu tahun 1982 dunia mengakui akan negara kepulauan. Tahun ini deklarasi itu genap berusia 50 tahun (*golden jubilee*). Pertanyaan sekarang apakah makna deklarasi itu atau negara kepulauan sudah diadopsi dalam gerak maju pembangunan bangsa Indonesia? Marilah kita hayati dan evaluasi bersama.

Makna Deklarasi Djuanda

Filosofi mendasar dari deklarasi tersebut adalah penyatuan wilayah, yang dahulunya terpisah-pisah oleh adanya laut bebas atau laut internasional di antara pulau, kini telah menjadi utuh sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya semangat kesatuan wilayah ini kita akan makin kuat dan akan dihormati dalam pergaulan di mancanegara. Tetapi belakangan ini ada beberapa bagian wilayah Indonesia ingin memisahkan diri

dari NKRI dan ingin merdeka. Kalaupun keinginan itu dipenuhi, sama artinya jerih payah para pejuang kita, tidak dihargai bahkan dapat dikatakan kita sendiri yang merobek keutuhan itu. Apakah itu arti kemerdekaan Indonesia? Marilah kita maknai perjuangan berat itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, agar kita makmur, kuat, jaya dan mandiri.

Pekerjaan rumah yang belum tuntas, antara lain batas wilayah kita ada yang belum selesai pembicaraan secara bilateral dengan negara tetangga, adanya zona tambahan 24 mil dari garis pantai belum diimplementasikan dalam regulasi negara, rakyat miskin masih banyak, kita sebagai negara kepulauan tetapi program-program pembangunan belum tergambar tentang “*archipelagic state*” itu, dan lain sebagainya.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas wilayahnya didominasi oleh perairan laut ($\pm 75,3\%$), dan banyak masyarakat Indonesia bermukim di pulau-pulau, seharusnya pola-pola pembangunan kita, tidak hanya terpusat di perkotaan saja tetapi harus berbasis pada “*archipelagic state*” itu.

Karena Deklarasi Djuanda itu pada penekanan kesatuan wilayah, maka kita harus memandang wilayah kita yang terdiri dari laut, daratan, udara dan tanah di bawah dasar laut adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, itulah yang kita kenal sebagai wawasan Nusantara. Dalam wilayah-wilayah inilah terkandung potensi dan kekayaan yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Implementasi arti “*archipelagic*

state” seharusnya terlukis dalam program-program pembangunan Indonesia, di mana wilayahnya didominasi oleh laut karenanya bidang kelautan dapat dijadikan pengarusutamaan dalam pembangunan. Tetapi realita sekarang gerak pembangunan kita belum ke arah itu.

Dua puluh lima tahun perjalanan Deklarasi Djuanda, barulah dunia mengakui sebagai negara kepulauan, dan tahun ini genap 50 tahun sudah saatnya makna negara kepulauan tertuang dalam program pembangunan nasional maupun daerah, sehingga arti pembangunan itu dirasakan oleh masyarakat yang hidup di pulau-pulau kecil dan terpencil.

Deklarasi Djuanda memiliki makna strategis dalam aspek budaya, sosial dan ekonomi, semangat kepeloporannya itu menjadi tonggak pengembangan budaya, sosial dan ekonomi bangsa. Dari sudut pandang politik, deklarasi yang sudah berumur lima puluh tahun akan menjadi “trigger” percepatan pembangunan di Indonesia sehingga negara siap menghadapi percaturan politik dunia, dan mampu menghadapi pasar global yang sedang melanda sekarang ini. Untuk itulah *golden jubilee* dari deklarasi Djuanda marilah kita bangkitkan rasa kesatuan bangsa Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik. ■ ti

Prof Dr Rizald M Rompas,

Sekretaris Dewan Maritim Indonesia. Disampaikan pada Diskusi Panel dalam Rangka Peringatan Hari Nusantara Tahun 2007 dan 50 Tahun Deklarasi Djuanda, di JMC, Gedung Dewan Pers, Jakarta, 5 Desember 2007.



Rizald Max Rompas

PROMOTOR PEMBANGUNAN BERBASIS KELAUTAN

Prof Dr Ir Rizald Rompas, M.Agr adalah tokoh kelautan yang baru bersinar dari timur Indonesia. Ia sedang gencar-gencarnya berpromosi agar bidang kelautan dapat menjadi arus utama dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan nasional. Alasan Rompas sederhana, Indonesia adalah negara kepulauan, dan sudah ada konsensus nasional yang tertuang dalam UUD 1945 hasil

amandemen, dan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJPMN), yang mengakomodir visi dan misi pembangunan kelautan.

Untuk mengarusutamakan pembangunan kelautan, Rompas, antara lain, dipercaya memegang jabatan Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia (Dekin).

Dekin adalah sebuah forum konsultasi bagi penetapan kebijakan

umum di bidang kelautan, yang tugasnya memberikan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia dalam penetapan kebijakan umum di bidang kelautan. Dekin beranggotakan para Menteri, berada langsung di bawah Presiden, dan dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Harian Dekin. Kegiatan sehari-hari Dekin digerakkan oleh Rizald Max Rompas selaku Sekretaris.

Rompas lahir di Manado 4 Mei 1953. Setelah lulus sebagai Insinyur Perikanan tahun 1979 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, termasuk diantaranya menjalani program afiliasi di IPB

Bogor, suami dari Fietje Memah, S.Pd ini mendapat tugas belajar ke Kyusu University, Fukuoka, Jepang pada tahun 1982. Pada tahun 1985 ia berhasil meraih gelar *Master of Agriculture* bidang *Marine Environmental*, dan gelar Doktor bidang *Environmental Toxicology* tahun 1988 di universitas yang sama.

Kepeloporan Rompas di bidang kelautan ditandai dengan pengukuhannya sebagai Guru Besar Bidang Biokimia di almamater Unsrat Manado pada tahun 1992, ketika usianya pada saat itu baru saja menginjak 39 tahun.

Di kampus tersebut, Rompas pernah meraih penghargaan sebagai Dosen Teladan I. Sejumlah jabatan

BIODATA



■ Nama: Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr ■ Lahir: Manado, 4 Mei 1953 ■ Pekerjaan: 1. Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan; 2. Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia ■ Istri: Fietje Memah, SPd ■ Anak: 1.

Fisher Bonni Rompas (27); 2. Kunio Wendy Rompas (23); 3. Howard Seiro Rompas (17 Thn) ■ Pendidikan: - SD GMIM VI, Manado, 1966; - SMP Kristen, Manado, 1969; - SMAN II, Manado, 1973; - S-1, Sarjana Perikanan, Unsrat Manado, 1979; - S-2, Master of Agriculture, Kyushu University, Fukuoka, Jepang, 1985; - S-3, Doctor of Environmental Toxicology, Kyushu University, Fukuoka Jepang, 1988; - Short Training, Australia, 1994 - Short Training, Amerika Serikat, 1995 ■ Jabatan: - Sekretaris Jurusan Faperi Unsrat, 1980-1982; - Pembantu Dekan I Faperi Unsrat, 1989-1992; - Dekan Fakultas MIPA UKIT Tomohon, 1991-1994; - Pembantu Dekan Faperi, Unsrat 1993-1995; - Kepala Lab Toksikologi dan Farmaseutika Kelautan; - Staf Ahli Kantor Bapedal Daerah Sulawesi Utara, 1997-2000; - Staf Ahli Menteri Departemen Kelautan dan

Perikanan, 2000-sekarang; - Sekretaris Umum Dewan Maritim Indonesia, 2001-2007; - Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia (Dekin), 2007-sekarang ■ Pengalaman Kerja: - Staf Ahli Bappeda Minahasa, 1993-1997; - Konsultan Proyek Natural Resource Management-USAID; - Komisi Amdal, Tingkat I Sulut; - Konsultan beberapa Studi Amdal; - Berbagai Proyek Penelitian kerjasama Unsrat dan Bappeda Tingkat I; - Anggota Penyusunan NKLD tahun 1988-1992; - Ketua Tim Penyusunan Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara, 1994-1995; - Konsultan Senior Tim Konsultatif Proyek P3T-Depnaker, 1998/1999; - Staf Ahli Bapedalda Sulawesi Utara; - Sekretaris Panwaslu Sulawesi Utara, 1999; - Ketua Pokja Sumber Daya Alam Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI); - Tim Persiapan Pembentukan Dewan Pembangunan Berkelanjutan, Kantor Meneg LH; - Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut; - Sekretaris Umum Dewan Maritim Indonesia ■ Alamat Rumah: Komplek Perumahan Puri Mustika, Jln. Berlian Blok C1/No.2 RT 05 RW 17 Bekasi Timur, 17115 ■ Alamat Kantor: Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia, Gedung Mina Bahari I, Departemen Kelautan dan Perikanan Lt. 3, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat 10110 ■

PROFIL

akademis pun pernah disandang, antara lain Sekretaris Jurusan (1980-1982), Pembantu Dekan I Faperi Unsrat (1989-1994), Dekan F-MIPA UKIT Tomohon (1991-1994). Rompas memperoleh promosi sebagai pejabat Eselon II ketika menjabat Pembantu Dekan Faperi Unsrat (1993-1995). Ia juga dipercaya sebagai Kepala Lab Toksikologi dan Farmaseutika Kelautan, serta Staf Ahli Kantor Bappedal Sulawesi Utara (1997-200).

Kiprah ayah tiga orang anak, Fisher Bonni Rompas (27), Kunio Wendy Rompas (23), dan Howard Seiro Rompas (17), ini semakin menasional tatkala diangkat menjadi Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2000 hingga sekarang. Bahkan, sejak tahun 2001, Rompas sudah dipercaya menjabat Sekretaris Umum Dewan Maritim Indonesia (DMI), yang terus berlanjut setelah DMI berubah nama menjadi Dekin.

Rizald Rompas berhasil meyakinkan berbagai pihak, terutama para pejabat penting di negeri ini, supaya mereka memiliki paradigma baru tentang pembangunan kelautan. Langkah pertamanya adalah mengubah nama DMI menjadi Dekin, sekaligus mereposisi tugas, pokok, fungsi dan peran kenegaraan Dekin.

Kendati sering mendapat kritikan, diantaranya, supaya Dekin seharusnya membuat *blueprint* atau cetak biru kebijakan umum pembangunan kelautan yang detil, sebagaimana dilakukan oleh Amerika Serikat dengan *Ocean Blueprint for 21st Century*, agaknya, pembangunan masa depan kelautan Indonesia masih sangat layak untuk dipercayakan kepada Rompas.

Setelah berhasil mereposisi DMI menjadi Dekin, sesuai Keppres No. 21 Tahun 2007 tentang Dewan

Kelautan Indonesia, ditetapkan 21 September 2007, Rompas atas nama Dekin pada 4 Desember 2007 berhasil menggelar *Ocean National Summit* di Jakarta, dipimpin oleh Wapres Jusuf Kalla. Pertemuan puncak nasional bidang kelautan ini dihadiri oleh para Menteri yang bersinggungan dengan soal-soal kelautan. Para Menteri itu akhirnya berhasil menandatangani sebuah kesepakatan bersama, untuk bersedia memberikan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan bidang kelautan.

Berdasarkan komitmen itulah Rompas kelak akan bisa lebih leluasa bergerak. Misalnya, dengan menginisiasi pola anggaran APBN yang mengakomodasi perjalanan dinas berbasis kelautan. Para perencanaan pembangunan di setiap departemen akan dititipinya pesan-pesan pembangunan yang berbasis kelautan. Termasuk pula menggenjot pendidikan nasional, baik itu oleh pemerintah terlebih kalangan swasta supaya mereka mencetak para kader pembangunan bidang kelautan. Rompas mengidealkan, sebagai negara kepulauan maka benak pikiran segenap warga bangsa harusnya memiliki pola pikir berbasis kelautan pula.

Sukses dengan *Ocean National Summit*, Rompas yang fasih berbahasa Inggris dan Jepang secara aktif, perannya akan semakin mendunia dengan menggelar *Ocean World Summit* atau pertemuan puncak para kepala negara seluruh dunia untuk membahas soal-soal pembangunan kelautan, berlangsung di Manado, Sulawesi Utara tahun 2009. ■ ti

Haposan Tampubolon
Amron dan Saut Situmorang

Kepedulian Membangun Potensi Kelautan MELALUI DUNIA PENDIDIKAN

Oleh:

Prof Dr Kanjeng Pangeran Tarnama Sinambela Kusumonagoro

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diakui sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 2/3 wilayah kedaulatannya adalah wilayah laut dan memiliki luas 5,8 juta km² yang terdiri dari 3,1 km² wilayah teritorial dan garis pantai sepanjang 95.181 km. Selain potensi fisik yang demikian besar, Indonesia dikaruniai pula berbagai sumber daya hayati, nir hayati dan kekayaan laut yang beraneka ragam.

Kemudian dari sudut pandang geografis, Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi strategis dalam lalu lintas perekonomian dunia, yaitu terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia) yang membuat masyarakat dunia mengakui Indonesia sebagai persimpangan lintas pelayaran niaga utama (*across the main commercial shipping line*). Kenyataan ini menjadikan modal dalam pembangunan di Indonesia masa kini dan ke depan haruslah berbasis kepada negara kepulauan yang mampu memadukan paradigma pendekatan “*land based socio-economic development*” dengan “*Marine based socio-economic development*”.

Pemerintah Indonesia telah menyosialisasikan wilayah perairan Indonesia melalui pengumuman Pemerintah tanggal 13 Desember 1957 yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Secara yuridis formal pengumuman pemerintah itu dituangkan dalam Undang-undang No. 4/Prp 1960 Tentang Perairan Indonesia.

Disahkannya Undang-undang itu, tentu merupakan keberhasilan perjuangan kita, mengingat dalam perkembangan hukum internasional banyak negara pantai yang berjuang menentukan laut wilayahnya lebih dari 3 mil laut. Bagi kita, ini menjadi bukti kesatuan wilayah (laut dan daratan) negara Indonesia, mengingat sebelumnya laut di antara pulau yang tadinya merupakan laut bebas telah tercakup dan dinyatakan sebagai perairan pedalaman Indonesia.

Tercakupnya ex laut bebas menjadi perairan pedalaman Indonesia menjamin berlakunya seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia dalam yurisdiksi ex laut bebas tadi, sehingga membatasi hak-hak negara lain, dengan ketentuan pengakuan atas lalu lintas damai bagi kapal-kapal asing untuk

PERSPEKTIF

melintasi laut wilayah 12 mil laut dalam perairan pedalaman Indonesia dari laut bebas ke laut bebas.

Keberhasilan perjuangan tersebut, berarti beban dan tanggung jawab pemerintah Indonesia di wilayah perairan semakin besar dan berat dengan bertambahnya luas wilayah perairan Indonesia dari 3,7 juta km² menjadi 5,8 juta km². Perjuangan dan keberhasilan ini merupakan bukti adanya kesatuan wilayah (laut dan daratan) negara Indonesia, sebab yang tadinya merupakan laut bebas, dengan diundangkannya UU tersebut, perairan Indonesia menjadi bagian dari wilayah negara kesatuan Indonesia.

Negara Kepulauan

Penyelenggaraan kehidupan nasional sebuah bangsa selayaknya senantiasa didasari oleh pandangan hidup dan cita-cita nasional, serta selalu menyatu dengan lingkungannya. Indonesia sebagai sebuah bangsa harus menghayati keberadaan diri dan memahami cita-citanya, sehingga arah dan langkah bangsa ini dalam mewujudkan cita-citanya dilandasi oleh cara pandang atau wawasan yang dapat memberikan corak, pola pikir, pola sikap dan pola tindak bangsa ini dalam menghadapi berbagai masalah baik nasional maupun global.

Kontelasi geologi dan geografi Indonesia, sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan cita-cita nasionalnya mendorong tumbuhnya wawasan yang mengkrystal menjadi aspirasi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nusantara (*archipelagic*) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh

laut. Laut yang menghubungkan dan mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di seantero khatulistiwa.

Sedangkan Wawasan Nusantara adalah konsep geopolitik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah Indonesia, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, sosial budaya, dan hankam.

Perkembangan luas wilayah laut harus disadari sebagai tantangan nyata untuk dikelola, dijaga dan diamankan bagi kepentingan bangsa Indonesia. Laut telah berkembang menjadi aset nasional sebagai wilayah kedaulatan, ekosistem, sumber daya yang dapat bertindak sebagai sumber energi, sumber bahan makanan, sumber bahan farmasi, serta berperan sebagai lintas laut antarpulau, kesadaran sosial-budaya, kawasan perdagangan, pariwisata dan wilayah pertahanan keamanan.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan handal yang dibangun dengan memperhatikan geostrategi dan geopolitik berdasarkan prinsip wawasan nusantara sebagai kesatuan ipoleksosbud hankam atas wilayah darat, laut dan udara maka diperlukan perangkat nasional berupa kebijakan kelautan Indonesia yang mencerminkan keterpaduan antarsektor, antarmatra, pusat sumber daya kelautan secara bijaksana untuk memberikan kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia.

Kebijakan kelautan yang dihasilkan harus memuat uraian-uraian

normatif yang berisikan kebijakan, program pengelolaan sumber daya kelautan meliputi:

a. Memantapkan konsep Wawasan Nusantara secara utuh dalam membangun Indonesia sebagai negara kelautan yang memiliki daya saing kuat dalam menghadapi persaingan global.

b. Pengelolaan sumber daya kelautan yang mengacu kepada prinsip pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan terpadu, dan prinsip kehati-hatian.

c. Menyelaraskan kebijakan sektoral pembangunan kelautan dan upaya penyelarasan antarsektor dan antarmatra.

d. Komitmen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara terpadu.

Potensi Sumber Daya Kelautan

Wilayah Indonesia mempunyai

potensi sumber daya pesisir yang sangat besar baik potensi hayati maupun non hayati. Potensi wilayah pesisir dan Lautan Indonesia dipandang dari segi fisik, terdiri dari Perairan Nusantara seluas 2,8 juta km² ; Laut Teritorial seluas 0,3 juta km² ; Perairan nasional seluas 3,1 juta km² ; Luas Daratan sekitar 1,9 juta km² ; Luas wilayah nasional 5,0 juta km² ; Luas ZEE (Zone Ekonomi Eksklusif) sekitar 3,1 juta km² ; Panjang garis pantai lebih dari 95.181 km dan jumlah pulau lebih dari 17.504 pulau.

Potensi sumber daya pesisir yang sangat berlimpah yakni mempunyai potensi lestari mencapai 6,1 juta ton per tahun, belum termasuk keragaman hayati lainnya seperti rumput laut, hutan bakau, terumbu karang dan lainnya. Potensi lainnya yang tak kalah berlimpah adalah potensi pariwisata, pertambangan misalnya minyak dan gas bumi, perhubungan



Prof Dr KP T Sinambela K berobsesi dirikan Kota Mahasiswa ■ mti/wilson

PERSPEKTIF

laut, dan jasa-jasa lainnya. Di samping itu, peningkatan permintaan konsumsi domestik dan internasional akan produk perikanan Indonesia merupakan potensi besar yang bisa dimanfaatkan dalam pembangunan sektor kelautan khususnya perikanan laut.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sektor pertambangan dan gas saat ini lebih dari 50% di antaranya dilakukan di wilayah pesisir dan laut (*off-shore*) dimana sebagian besar cadangan potensial berada di wilayah laut pula. Permintaan akan produksi minyak dan gas dari dalam maupun luar negeri yang terus meningkat merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan bagi pengembangan sektor minyak dan gas, yang tentu akan memerlukan industri penunjang seperti industri bangunan lepas pantai, industri perkapalan, dan lainnya.

Sementara itu, kebutuhan akan kapal laut juga akan meningkat pesat di masa datang seiring peningkatan kebutuhan akan sarana angkutan barang dan penumpang. Seperti telah kita ketahui, makin meningkatnya arus barang berjalan paralel dengan meningkatnya kegiatan ekonomi suatu negara atau pulau dalam kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan.

Kebutuhan akan kapal angkutan barang akan meningkat karena kemampuan kapal laut yang mengangkut dalam jumlah besar yang didukung ketepatan waktu yang bisa diandalkan dengan biaya yang relatif sangat murah. Dalam perekonomian dunia yang makin kompetitif, ketiga faktor tadi mendorong transformasi angkutan barang dunia yang makin mengandalkan laut sebagai media transportasi perdagangan internasional. Indonesia yang memiliki wilayah laut yang sangat luas dan terletak di

jalur utama transportasi laut internasional sangat beruntung. Karena Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan sarana dan prasarana bagi aktivitas bongkar-muat kapal perdagangan internasional, sekaligus membuka peluang bagi pembangunan ekonomi melalui kegiatan ekspor dan impor produk potensial Indonesia.

Potensi Wilayah Pesisir dan laut Indonesia dipandang dari segi pembangunan (dahuri, 2002) adalah sebagai berikut:

a. Potensi sumber daya dapat pulih (*renewable resource*), antara lain ikan dan biota perairan lainnya, hutan mangrove, padang lamun, rumput laut, ekosistem pantai, dan pulau-pulau kecil.

b. Potensi sumber daya tidak pulih (*nonrenewable resource*). Sumber daya alam non Hayati, minyak dan gas bumi, bahan tambang dan mineral.

c. Energi Kelautan, antara lain gelombang, pasang surut, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), dan angin.

d. Jasa-jasa kelautan adalah merupakan Potensi Pariwisata Bahari.

e. Industri Maritim seperti galangan kapal dan industri penunjang.

f. Industri pelayaran dan muatan.

g. Energi Kelautan seperti potensi energi kelautan, konversi energi panas samudera/OTEC, Ombak (wave). Pasang surut (tidal), Endapan Gambut, Pemanfaatan Energi Nir konvensional.

Permasalahan dan Kendala Pembangunan Kelautan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia selama ini belum dapat memanfaatkan sumber daya kelautan secara optimal. Pengelolaan dan

pemanfaatannya mencakup ruang lingkup luas meliputi berbagai jenis komoditi, usaha dan jasa seperti halnya perikanan tangkap dan budi daya, transportasi, pertambangan, wisata bahari, pembangkit energi. Di samping itu, sumber daya kelautan dapat pula bertindak sebagai penyedia lapangan kerja, wilayah hukum dan lain sebagainya. Namun demikian perlu juga disadari bahwa mengelola laut memiliki risiko tinggi terhadap kondisi alam, memerlukan investasi besar, dukungan teknologi dan SDM yang memadai. Mengingat perairan Indonesia merupakan bagian dari laut dunia, maka dalam pengelolaannya tidak dapat lepas dari peraturan hukum internasional yang berlaku.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perlu mendapat perhatian serius antara lain:

a. Penataan Batas Maritim

Bagi negara kepulauan, merupakan tantangan nyata dan tanggung jawab besar untuk menyelesaikannya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia belum memanfaatkan kewenangan menetapkan Zona Tambahan, sehingga berdampak pada pengaturan Kepabeanaan, Keuangan, Imigrasi, dan Karantina kesehatan. Permasalahan lainnya yang cukup mendasar bagi Indonesia untuk menata batas maritim adalah belum didepositkan kepada PBB koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan. Koordinat ini merupakan dasar penarikan garis pangkal dan batas-batas maritim lainnya.

b. Konflik Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut

Adanya berbagai kepentingan

dalam pemanfaatan ruang laut sering menimbulkan konflik pemanfaatan ruang laut. Hal ini terjadi karena pesisir dan laut belum ditata secara baik dan masih mendasarkan kepentingan masing-masing sektor. Kondisi ini menuntut adanya penataan ruang laut secara terpadu dan terkoordinasi.

c. Keamanan dan Keselamatan di Laut

Berbagai bentuk dan sifat ancaman di laut yang perlu diwaspadai di antaranya penyelundupan, terorisme, *transnational crimes*, penangkapan ikan secara ilegal, dan pencemaran. Untuk mengatasi ini diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum di laut.

d. Otonomi Daerah

Perubahan paradigma pembangunan sentralistik menjadi desentralistik berdasarkan UU No.22 tahun 1999 yang selanjutnya diubah menjadi UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dapat berdampak semakin kompleks permasalahan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Permasalahan pengelolaan laut yang selama ini belum menunjukkan sinergi antarsektor ataupun antar-matra, dikhawatirkan dapat berkembang menjadi permasalahan terhadap pelaksanaan otonomi daerah terhadap pengelolaan sumber daya khususnya kelautan masih beragam, batas wilayah pengelolaan perairan seringkali disalahartikan sebagai batas administrasi atau bahkan sebagai wilayah kedaulatan daerah. Hal ini telah memicu adanya konflik antar daerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

e. Sumber Daya Manusia

Bagian terbesar penduduk

PERSPEKTIF

Indonesia yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan aset atau potensi yang menunjang pembangunan kelautan. Namun diperlukan peningkatan kompetensi dan kapasitasnya melalui pendidikan serta dalam pembangunan kelautan.

f. Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan

Riset, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karenanya berbagai RIPTEK kelautan sejauh mungkin harus dikuasai. Pengembangan ini perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia, organisasi, teknologi dan keluaran yang dihasilkan berbentuk data dan informasi.

Kepedulian Membangun Potensi Kelautan di Bidang Pendidikan

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, salah satu tujuan utama pendidikan adalah mencerdaskan bangsa, yaitu menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas sehingga mampu mengembangkan karsa dan daya ciptanya serta mengelola sumber daya ekonomi dan semua potensinya untuk kemakmuran seluruh anak bangsa. Pembangunan kualitas manusia di segala bidang makin mendesak sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan standar keahlian dan keterampilan sumber daya manusia, sebagai akibat dari makin cepatnya dinamika perubahan sosial, ekonomi dan politik global dan nasional. Perubahan di segala bidang yang begitu cepat akan meningkatkan



KOTA MAHASISWA: Maket Universitas Mpu Tantular dan Institut Kelautan di Jonggol ■ mti/ist



KP T Sinambela K, karya nyata ■ mti/ws

tantangan masa depan bagi pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan seluruh lembaga sosial dan ekonomi di negeri ini. Untuk kebijakan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia harus mengantisipasi dan berorientasi pada perubahan masa depan baik yang berskala nasional maupun global.

Di tengah-tengah dinamika perubahan global dan nasional tersebut kini terjadi perubahan global yang tidak kalah pentingnya, yaitu pemanasan global (*global warming*). Isu pemanasan global makin menghangat dan menyita perhatian sebagian besar negar-negara di dunia. Penyelenggaraan Conference of Parties (COP) ke-13 tentang *Climate Change* yang diselenggarakan di Bali pada awal Desember 2007 merupakan wujud perhatian dan komitmen dunia untuk melakukan mitigasi dan melakukan langkah-langkah nyata untuk mencari solusi dampak negatif perubahan iklim.

Perubahan-perubahan tadi tentunya merupakan tantangan bagi kita semua, terutama kemampuan kita untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri membangun negeri ini di tengah-tengah perubahan yang begitu hebat. Namun demikian perlu disadari, harus bekerja keras untuk dapat menyesuaikan dan memenangkan persaingan global. Menurut *World Economic Forum* dalam laporannya bertajuk *The Competitiveness Index*, daya saing ekonomi Indonesia masih menempati urutan bawah, yaitu dari 121 negara pada tahun 2007-2008 menempati urutan ke-54 dengan skor 4,24 merosot 3 poin dibanding dengan peringkat tahun 2006. Daya saing (*competitiveness*) tersebut diukur berdasarkan beberapa faktor pendukung yaitu: 1) kelembagaan, 2) sarana dan prasarana, 3) ekonomi makro, 4) kesehatan dan pendidikan dasar, 5) pendidikan tinggi dan pelatihan, 6) efisiensi pasar, 7) kesiapan teknologi, 8) sofistikasi bisnis, 9) inovasi.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pengembangan sistem dan

PERSPEKTIF

kelembagaan pendidikan yang mampu mengantisipasi dan menyesuaikan perubahan. Pengembangan kualitas pendidikan mencakup: 1) materi dan proses pembelajaran, 2) kualitas pendidik, 3) kualitas sarana dan prasarana pendidikan, 4) standar kompetensi peserta didik, 5) kualitas lembaga penyelenggara, 6) penelitian, 7) jaringan kerja antar perguruan tinggi, 8) sistem pembiayaan pendidikan. Kedelapan aspek tersebut perlu dirancang dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan masa depan dengan berstandar pada sistem pendidikan yang ada di lembaga-lembaga pendidikan ternama dunia.

Sejarah Singkat Universitas Mpu Tantular

Yayasan Pendidikan Budi Murni yang berdiri sejak tahun 1976 telah mengelola sekolah-sekolah dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan SLTA. Pada tahun 1984 Universitas Mpu Tantular (UMT) berdiri berdasarkan Surat Kopertis Wilayah III DKI Jakarta Nomor 17/Kop. III.S.IX/1984 dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika dan Tut Wuri Handayani.

Berdasarkan filosofi ini maka UMT telah mengembangkan 7 (tujuh) fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Teknologi Informatika dan Komputer, Fakultas Maritim dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Hingga saat ini Universitas Mpu Tantular telah meluluskan 3.528 alumni.

Masyarakat umum dan para alumni mendesak agar Universitas Mpu Tantular mendirikan program studi lanjutan, terutama Program Magister (S2) dengan alasan: (1) Kematangan dalam usia mendidik

(+/- 23 tahun); (2) Independen; (3) Memiliki Dosen Prof. S-3 yang dominan; (4) Kampus representatif; serta (5) Terjangkau dari manapun (di pinggir jalan TOL). Kehendak ini dipenuhi oleh Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (MIH Tantular) tahun akademik 2007/2008. Selain itu, Program Studi Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular telah mendapatkan Akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 08308/Ak-SI-028/UMH XX/1/2006.

Fakultas Maritim

Yayasan Pendidikan Budi Murni berupaya meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan dengan mendirikan Fakultas Maritim di Universitas Mpu Tantular. Fakultas Maritim pertama di Indonesia ini telah dimulai pada tahun akademik 2006/2007, dengan program studi konsentrasi pada: 1. Ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhan; 2. Nautika Pelayaran Niaga; dan 3. Tehnik Perkapalan Niaga.

Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Maritim Universitas Mpu Tantular dengan program studi dengan gelar sbb: 1. Sarjana Pelayaran (SI - Pel) Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan; 2. Sarjana Pelayaran (SI - Pel) Kenautikaan Pelayaran Niaga; 3. Sarjana Pelayaran SI - Pel) Tehnik Perkapalan Niaga.

Analisa kebutuhan SDM Ilmu Kemaritiman/Kelautan Pelayaran Niaga, Kepelabuhanan, Kenautikaan, dan Tehnik Pekapalan Niaga, yang dibutuhkan langsung oleh lembaga yang memanfaatkan bidang ilmu tersebut di atas, yaitu: 1. Departemen Perhubungan; 2. Kantor Administrasi (Adpel) dan Kantor Syahbandar seluruh Indonesia; 3. Kantor Dinas Perhubungan untuk

33 provinsi; 4. Dinas Perhubungan untuk 500 Kabupaten/Kota; 5. Perusahaan Pelayaran. Di Indonesia jumlahnya ada 975 Perusahaan Pelayaran; 6. Perusahaan Pelabuhan. Di seluruh Indonesia 200 Pelabuhan; 7. Keperluan anak buah kapal tamber. Di Indonesia jumlahnya 240 unit kapal;

8. Keperluan anak buah kapal niaga ukuran besar. Jumlahnya 951 unit kapal; 9. Keperluan anak buah kapal niaga ukuran sedang. Jumlahnya 1271 unit kapal; 10. Keperluan anak buah kapal tenda. Jumlahnya 1014 unit kapal; 11. Keperluan anak buah kapal ASDP. Jumlahnya cukup banyak; 12. Keperluan anak buah kapal perikanan. Jumlahnya 492 unit kapal.

13. Keperluan anak buah kapal perikanan, sekarang jumlahnya sebanyak 3816 unit kapal ikan ukuran besar; 14. Keperluan anak buah kapal berbendera asing/luar negeri yang jumlahnya cukup banyak; 15. Perusahaan yang bergabung dalam organisasi/ INSA sejumlah 975 perusahaan pelayaran; 16. Perusahaan Forwarding yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), sejumlah 3100 Perusahaan Freight forwarding;

17. Perusahaan Pelayaran lokal/ rakyat di Indonesia jumlahnya cukup banyak dan sangat membutuhkan tenaga lulusan Sarjana Pelayaran.

Tenaga sumber daya manusia lulusan dari Sarjana Pelayaran masih sangat sedikit. Hanya sekitar 500 orang. Sedangkan yang dibutuhkan untuk sumber daya manusia S1 Pelayaran sampai dengan tahun 2010 sekitar 5000 S1 Pelayaran. Memperhatikan potensi besar sektor Kemaritiman/ Kelautan Pelayaran, Kepelabuhan, Kenautikaan, dan Teknik Perkapalan maka pada

pemerintah sekarang ini, sektor Kelautan/Pelayaran menjadi prioritas pengembangan mulai tahun 2000 dan seterusnya.

Oleh karena itu, arah kebijakan strategis dan operasional adalah ke bidang atau sektor maritim, kelautan dan pelayaran. Sejalan dengan kebijakan pemerintah maka permintaan kebutuhan tenaga kerja lulusan sarjana pelayaran akan sangat tinggi dan meyakinkan.

Daya Tampung Mahasiswa

Selama 5 tahun ke depan yaitu tahun 2007-2015 daya tampung mencapai lebih kurang 5000 orang sehingga sangat diperlukan fasilitas gedung kuliah dan kegiatan lainnya.

Untuk pengembangan kampus, telah tersedia tanah yang dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Budi Murni seluas 500 hektar terletak di Jonggol, Jawa Barat. Tahun 2008-2009, tanah tersebut dapat digunakan sebagai lahan kampus Fakultas Maritim Universitas Mpu Tantular Internasional sebagai kampus wisata terpadu yang meliputi ruang kelautan Yayasan Pendidikan Budi Murni, ruang kelautan Rektor Universitas Mpu Tantular, ruang kelautan Dekan Fakultas Maritim, ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, asrama, sarana olahraga, dan sebagainya.

Pembangunan fasilitas fisik kampus Fakultas Maritim Universitas Mpu Tantular Internasional, Jonggol, Jawa Barat telah mulai dilaksanakan dengan sarana dan prasarana meliputi antara lain: 1. Parking Area; 2. Main Administration Office; 3. Auditorium; 4. Bank, shop dan canteen; 5. Port & shipping management classroom; 6. Marine engineering classroom; 7. Nautical class and shipping Business; 8. Laboratorium workshop & simulator; 9. Short course classroom; 10. Boat

PERSPEKTIF

house jetty & life boat; 11. Survival exercise pool; 12. Smoke chamber; 13. Dark chamber & Tanker simulation; 14. Fire Ground, Double Decker; 15. Senior Cadet Dormitories; 16. Star field; 17. Football Field; 18. Olympic size Swimming pool; 19. Indoor Sport hall; 20. Incenerator; 21. Garage; 22. Lectures house; 23. Generator; 24. Sentani river; 25. Mosque; 26. Church; 27.dll.

Maritim Training Center

Maritim Training Center dibangun dengan kelengkapan: 1. GOC Gmb Ss (Sertifikat GOC GMDSS); 2. ROC Gmds (Sertifikat ROC GMDSS); 3. SOU/ Rou (Sertifikat SOU/ROU); 4. SOT/ROC (Sertifikat SOT/ROC); 5. Radar/ Arpa Simulator; 6. Crowded & Crisis Management; 7. Export - Import Plus; 8. Shipping Practice; 9. Management Logistic; 10. Sistem Single WH-,U-'U-vv (SW); 11. Sistem National Single Window (Nsw); 12. Sistem Asean Single Window (Asw).

Pengembangan Fakultas Maritim

Sebagai pengembangan dari Fakultas Maritim pada jangka menengah karena untuk menampung peminat yang cukup besar, maka akan didirikan Institut

Kelautan Internasional sebagai Pusat Riset Kelautan Internasional (Ocean Research Centre) yang nantinya akan membuka beberapa fakultas yang berhubungan dengan segala aspek pemberdayaan SDM Kelautan dalam bidang Perikanan, Pariwisata, Energi dan Industri maritim. Di samping itu, dilakukan penelitian dalam bidang kelautan dalam menunjang antara lain:

- a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Maritim.
- b. Program Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Masyarakat Pesisir Lainnya.
- d. Program Penyertaan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan Otonomi Daerah. ■

Prof Dr Kanjeng Pangeran Tarnama Sinambela Kusumonagoro, Pengusaha, Pendiri Universitas Mpu Tantular, Jakarta

*Disampaikan pada Diskusi Panel dalam
Rangka Peringatan Hari Nusantara Tahun
2007 dan 50 Tahun Deklarasi Djuanda, di
JMC, Gedung Dewan Pers, Jakarta, 5
Desember 2007.*



Fakultas Maritim Universitas Mpu Tantular ■ mti/ws

PROFIL

PROF DR KANJENG PANGERAN Tarnama Sinambela KUSUMONAGORO

**Pengusaha
Bervisi
Pendidikan
Kelautan**



BEROBSESI

Bangun Kota Mahasiswa

Pendiri kelompok usaha kontraktor Grup Sumber Batu, lembaga sekolah Yayasan Pendidikan Budi Murni, serta Universitas Mpu Tantular, ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap dunia pendidikan, termasuk pendidikan kelautan. Dengan menyajikan aneka jenjang pendidikan kepada semua anak bangsa sejak TK hingga perguruan tinggi, putra bangsa asal Desa Pangasean, Sumatera Utara ini memiliki cita-cita terbaru yakni mendirikan sebuah Kota Mahasiswa Mpu Tantular yang di dalamnya kelak secara terpadu berdiri Universitas Mpu Tantular, Institut Kelautan Indonesia, Pusat Riset Kelautan (*Ocean Research Center*) bertaraf internasional, perpustakaan mahasiswa, asrama mahasiswa, danau buatan, bioskop dan berbagai kelengkapan lain hingga setiap mahasiswa sepanjang menjalani studi selama lima tahun menghabiskan waktunya cukup di satu lokasi saja, yaitu di Kampus Kota Mahasiswa Terpadu Mpu Tantular.

Kesuksesan selaku kontraktor nasional, salah satunya ditorehkan dengan posisinya sebagai pionir dalam penggunaan aspal beton *hotmix* di jalan-jalan protokol maupun jalan provinsi Jakarta dan seluruh kota-kota besar lain di Tanah Air, yang pembangunannya dipercayakan kepada Grup Sumber Batu. Hal ini telah melambungkan nama Kanjeng Pangeran Tarnama Sinambela.

Namun nama besar sebagai

pengusaha sukses sama sekali tak membuat pria kelahiran 15 Juli 1943 ini sampai lupa diri.

Pengalaman tat kala hidup bersusah payah dan menimba ilmu ke sekolah yang jaraknya berkilo-kilometer, di kemudian hari mendorongnya untuk juga turut berpartisipasi mengembangkan dunia pendidikan. Tarnama ingin membangun sekolah sebanyak-banyaknya secara merata. Tujuannya sederhana, pengalaman berjalan kaki sebegitu jauh dahulu untuk bersekolah supaya tak lagi dialami oleh generasi masa kini dan yang berikutnya.

Keprihatinan hidup semasa di kampung memang masih tetap membekas, hingga membuat diri Tarnama Sinambela bertekad untuk membantu siapa saja agar tak mengalami kepayahan hidup seperti dirinya. Salah satunya adalah dengan menjadi pendidik bagi semua orang lewat aneka jenjang pendidikan yang dikelola Yayasan Pendidikan Budi Murni, mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK, akademi, institut dan universitas.

Itulah sebabnya, Yayasan Pendidikan Budi Murni sudah didirikannya sejak tahun 1976, bersamaan masanya dengan era permulaan kegemilangannya selaku kontraktor nasional.

Yayasan Pendidikan Budi Murni yang didirikan Tarnama awalnya hanya mengelola dua sekolah di kawasan Cipayung, Pasar Rebo, Jakarta Timur dan di Kedoya, Jakarta Barat. Tetapi dalam tempo dua tahun kemudian berkembang

lebih lengkap mulai dari Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, dan SMA hingga STM.

Belum merasa cukup, setelah puluhan TK sampai SMA didirikan Sinambela dengan jumlah siswa sembilan ribuan, putra bangsa yang peduli pendidikan ini kemudian mencita-citakan pendirian sebuah perguruan tinggi yang mampu menampung puluhan ribu mahasiswa dari seluruh penjuru Tanah Air. Karena itu dalam rencana Tarnama, perguruan tinggi itu harus lengkap, bermutu dan memberikan kesempatan belajar kepada generasi muda tanpa pandang bulu.

Akhirnya pada tahun 1984 bersama sejumlah rekan-rekan yang seide dan semisi dalam memajukan dunia pendidikan, Tarnama Sinambela resmi mendirikan Universitas Mpu Tantular.

Awalnya Tarnama hanya membuka empat fakultas, yakni Fakultas Hukum (3 jurusan), Fakultas Ekonomi (3 jurusan), Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (2 jurusan), dan Fakultas Teknik Industri (2 jurusan).

Belakangan Universitas Mpu Tantular menjalin kerjasama dengan John Dewey University, Amerika Serikat. Kedua perguruan tinggi sepakat menandatangani memorandum of understanding (MoU), yang berisi kesepakatan untuk tukar menukar mahasiswa, pengadaan buku-buku dan fasilitas lainnya.

Berhak Mendapat Pendidikan

Langkah keberanian teranyar Tarnama selaku pendidik bagi semua anak bangsa adalah mendirikan Fakultas Maritim Universitas Mpu Tantular (FM-UMT), yang hingga kini tercatat sebagai satu-satunya universitas yang memiliki fakultas maritim di seluruh Indonesia. Tarnama memiliki pandangan

yang visioner sekali dalam hal ini, bahwa laut Indonesia yang memiliki kandungan potensi ekonomis hingga senilai 156 miliar dollar AS per tahun harus dikelola secara maksimal. Dan cara terbaik untuk mengelola potensi itu adalah dengan terlebih dahulu menyiapkan sumber daya manusianya, dengan mendidik anak-anak bangsa menjadi kader pembangunan kelautan.

Visi itu akan semakin dipertajam lagi ke depan dengan rencana besar Tarnama mendirikan lembaga pendidikan tinggi baru yang dinamakan Institut Kelautan Mpu Tantular, berikut segala fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarannya secara terpadu di Kota Mahasiswa Mpu Tantular, seluas 500 hektar terletak di wilayah Jonggol, Bogor, Jawa Barat.

Ide soal Kota Mahasiswa konon sudah lama diidam-idamkan oleh Tarnama Sinambela. Belum lengkap dirinya merasa sebagai pendidik bagi semua anak bangsa tanpa berusaha mewujudkan Kota Mahasiswa sebagai fasilitas paling premium di dunia pendidikan. Untuk mewujudkan itulah dia melirik tanah di Jonggol. Kampus baru yang hendak didirikan nantinya akan dilengkapi pula dengan tempat-tempat ibadah seperti masjid dan gereja, ada salon, kolam renang, supermarket, toko buku, sarana olahraga, restoran, laboratorium dan berbagai fasilitas pendukung.

Dengan demikian mahasiswa selama tinggal di asrama tidak perlu pergi keluar untuk memenuhi kebutuhannya, karena dalam kompleks semua sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas.

Prinsip yang selalu dipegang teguh oleh Tarnama Sinambela, yang membuatnya begitu *concern* pada dunia pendidikan adalah bahwa semua anak-anak bangsa Indonesia



Dr KP T Sinambela K bersama Drs RU Simarmata, Ketua BPH UMT ■ mti/ht

berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Karena itu ia tak segan untuk mengulurkan bantuan menyekolahkan anak-anak dari keluarga tak mampu. Dalam membantu, dirinya tidak pernah pilih kasih. Yang penting anak yang dibantu itu mau bersekolah. Sinambela rela merogoh kantong sendiri, atau memberi memo tentang seseorang untuk tidak membayar SPP di sekolah atau universitas miliknya.

Saking banyaknya, Tarnama Sinambela tak pernah tahu dengan pasti siapa saja anak-anak yang pendidikannya pernah dibantu. Terkadang, di luar dugaan ada tamu tak dikenal datang berkunjung ke rumahnya sekadar bersilaturahmi. Belakangan setelah berbincang-bincang barulah ketahuan bahwa tamu tersebut adalah salah satu anak asuhnya yang pernah dibantu pendidikannya.

Kebanggaan tentu saja menyelimuti hati Sinambela sebab mereka yang pernah dibantunya banyak yang sudah berhasil. Ada yang berprofesi militer, polisi, insinyur, dokter sampai karyawan.

Tak sia-sia rasanya dia mengulurkan bantuan bagi mereka. Bahkan

sudah tak terhitung jumlahnya penerima bantuan pendidikan itu. Terutama keluarga dan handai taulannya dari Sumatera Utara, diantaranya ada yang sekadar mendapat biaya hidup, tempat tinggal, ditanggung biaya pendidikan, bahkan ditampung di rumah Sinambela sendiri.

Memiliki Segudang Mimpi

Sebelum dikenal sebagai tokoh pendidikan kelautan, Tarnama Sinambela sesungguhnya adalah seorang anak petani dengan segudang mimpi. Hanya berbekal ijazah SMA dan uang hasil penjualan bebek, Tarnama memberanikan diri merantau mengadu nasib ke Jakarta. Beruntung sekali ia memiliki naluri bisnis yang sangat tajam untuk mewujudkan cita-cita ingin meraih kesuksesan di tanah perantauan.

Tarnama Sinambela, demikian orangtuanya memberinya nama. *Tarnama* yang berarti 'terkenal', merupakan wujud harapan orangtuanya agar anak mereka ini kelak benar-benar menjadi orang terkenal.

Tarnama menghabiskan masa kecil di Desa Pangasean, Porsea, kini masuk Kabupaten Toba Samosir,

Sumatera Utara sebuah kampung yang terletak persis di bibir pantai Danau Toba yang indah. Putra pasangan Hiobaja Sinambela dan Tiopan Boru Marpaung ini sejak kecil rajin membantu orangtua. Sesekali dia membantu ibunya di dapur, menumbuk beras menjadi tepung untuk membuat kue khas orang Batak bernama *lampet*. Tarnama juga sering pergi ke sawah membantu ayah atau mencari kayu bakar.

Setelah menamatkan pendidikan di Sekolah Rakyat (setingkat Sekolah Dasar) tahun 1956, Tarnama melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di desa sebelah, yang jaraknya 5 km dari desanya, dengan berjalan kaki tanpa sepatu.

Tahun 1958 Tarnama masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) di Medan. Setelah lulus tahun 1960, keinginannya untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi makin menggebu. Maka dengan restu kedua orangtuanya berangkatlah Tarnama muda ke Jakarta hanya berbekal ijazah SMA dan uang hasil penjualan bebek peliharaannya.

Cobaan pertama harus dihadapinya dalam mencapai cita-cita. Dia sempat terdaftar sebagai Taruna TNI AU di Lanuma Solo, namun karena kesala-



Lokasi Kota Mahasiswa di Jonggol, Jawa Barat ■ mti/ist

han seorang rekan sependidikan, dia dan rekan-rekannya dinyatakan gugur.

Bukan Tarnama Sinambela namanya kalau berputus asa. Untuk menyambung hidup dia mencari kerja. Beruntung dia diterima sebagai asisten pelaksana proyek pembangunan Hotel Indonesia, yang sedang dikerjakan PT Pembangunan Perumahan (PP).

Setelah itu karirnya meningkat menjadi pelaksana proyek pengadaan material dan tenaga kerja. Setelah Hotel Indonesia selesai, dia diangkat sebagai *food and beverage manager*. Di hotel itu pula ia berkenalan dengan Prof. Dr. Ir. Rooseno, ahli beton bertulang yang sedang



Asrama Mahasiswa Fakultas Maritim UMT ■ mti/ist

PROFIL

mengerjakan proyek gedung Sarnah. Tarnama bergabung dan menjadi direktur harian.

Di sela-sela kesibukan dan karirnya yang semakin menanjak, Tarnama muda berkenalan dengan seorang gadis Tapanuli bernama Londam Damaris boru Tampubolon. Tahun 1963, setelah pacaran selama 6 bulan dan mendapat restu orangtua, keduanya sepakat menikah.

Kebahagiaan keluarga baru ini menjadi lengkap dengan kehadiran dua buah hati mereka, Budi Parlington Sinambela, lahir 8 Mei 1964 dan Santo Mulya Parulian Sinambela, 18 Oktober 1965.

Merintis Usaha Sendiri

Meski sangat menikmati pekerjaan mendampingi Prof. Dr. Ir. Rooseno, yang sudah dianggapnya sebagai mentornya, terbetik keinginan Tarnama Sinambela untuk merintis usaha sendiri.

Maka didirikannya CV Sumber Batu yang bergerak di bidang kontraktor. Berkat kelihaihan dan naluri bisnisnya yang tajam dia berhasil mendapatkan banyak proyek dan menambah jumlah karyawan. Sehingga pada tahun 1974, badan hukum CV Sumber Batu ditingkatkan statusnya menjadi perseroan terbatas (PT Sumber Batu).

Rekan-rekan bisnis dan sepergaulannya mengenal Tarnama sebagai orang yang punya intuisi tajam dalam berbisnis. Sekalipun awalnya dia sering diprotes karena perhitungan bisnisnya terlalu jauh ke depan, pada akhirnya orang akan mengakui bahwa apa yang dilakukannya itu ternyata menguntungkan. Bahkan ia sering mendapat proyek sebelum orang mengetahui adanya proyek tersebut.

Tarnama juga dikenal senang

melakukan diversifikasi usaha. Perhitungannya, makin banyak usaha, makin banyak peluang kerja yang diciptakan. Diam-diam rupanya dia merasa prihatin dengan sempitnya lapangan kerja di Indonesia.

Visinya yang jauh ke depan dan tangan dinginnya akhirnya berhasil melahirkan 14 perusahaan dengan kekuatan 3.250 karyawan. Sebagai pelaku dunia usaha, dia telah banyak bersentuhan dengan dunia birokrasi, organisasi dan dunia pendidikan. Sederet gelar akademik diperoleh dari berbagai lembaga perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Tak heran banyak kalangan yang menganggap kejayaan bisnis Sinambela ibarat sebuah sarang laba-laba. Usaha yang satu saling mendukung dengan yang lain. Tak pernah ada peluang yang lepas. Berbagai usaha dalam banyak bidang didirikannya dengan akselerasi strategis.

Kelompok usahanya mampu bertahan karena menggunakan sistem manajemen berefisiensi tinggi.

Sikap kepemimpinannya yang kebapakan dan membaur dengan para karyawannya, membuat dirinya disayangi dan disegani. Para karyawannya pun merasa nyaman bekerja di perusahaannya.

Kesuksesan Tarnama Sinambela di dunia usaha tak pelak merupakan bekal berharga baginya dalam membangun dunia pendidikan bertaraf internasional. Ia pun siap mendukung setiap visi besar bangsa yang hendak memajukan pembangunan nasional berbasiskan negara kepulauan. ■ [ti \(tokohindonesia.com/tarnama-sinambela\)](http://ti.tokohindonesia.com/tarnama-sinambela)

Retno Handayani

Haposan Tampubolon

BIODATA

Nama: Prof. DR. Kanjeng Pangeran Tarnama Sinambela Kusumonagoro ■ **Lahir:** Porsea, 15 Juli 1943 ■ **Isteri:** Londam Damaris br. Tampubolon ■ **Anak:** 1. KRHT Budi Parlindungan Sinambela, BDN, BBA; 2. DR Santo Mulia P. Sinambela, SE ■ **Pendidikan:** -Sekolah Rakyat (SR), Tapanuli, 1950; -SMP, Tapanuli, 1956; -SMA, Medan, 1959; -Sarjana Administrasi Negara, Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, 1976; -Memperoleh Gelar Doctor Honoris Causa, dari Universitas Sariwegading (UNSA), Jakarta, 1980; -Memperoleh Gelar Doctor of Business Administration dari John Dewey University of America, AS, 1980; Memperoleh Gelar Doctor of Business Administration dari Universitas Damegis Americanum Republika Washingtonesis, AS, 1981; -Memperoleh Gelar Profesor dari Universitas Damegis Americanum Republika Washingtonesis, AS, 1988; -Memperoleh Gelar Profesor of Business Administration dari Adam Smith University of America, AS, 1991; -Memperoleh Gelar Profesor of Philosophy dari John Dewey International University, AS, 1993 ■ **Pendidikan Khusus:** -Kursus Beton Bertulang, 1963; -Lokakarya Teknologi Manajemen Industri di ITB Bandung, 1981; -Study Tour Konstruksi Baja di Korea Selatan, 1982; -Study Tour Konstruksi Jalan Kendaraan di Belanda, 1982; -Seminar Asphalt Concrete Construction di Jakarta, 1984; -Penataran P4 bagi calon penatar tingkat nasional, 1984; -Seminar Kewaspadaan Nasional oleh Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), 1985 ■ **Gelar Kebudayaan:** -Memperoleh Gelar Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) dari Keraton Solo, Surakarta, 1985; -Memperoleh Gelar Kanjeng Raden Haryo Tumenggung (KRHT) dari Keraton Solo, Surakarta, 1987; -Memperoleh Gelar Kanjeng Raden Haryo (KRH) dari Keraton Solo, Surakarta, 2000; -Memperoleh gelar Kanjeng Pangeran (KP) dari Keraton Solo, Surakarta, 2003 ■ **Penghargaan Bidang Seni Budaya:** -Dinobatkan sebagai Pria Berbusana Terbaik, 1987; -Memperoleh penghargaan dari Lembaga Sisingamangaraja XII atas peran serta menyukseskan pelaksanaan peringatan 10 windu wafatnya Pahlawan Sisingamangaraja XII, 1987 ■ **Penghargaan Bidang Usaha:** -Dinobatkan sebagai salah satu Pahlawan Wiraswasta dalam buku profil 10 Pengusaha Indonesia, 1992

-Dinobatkan sebagai Putra Penerus Pembangunan Bangsa oleh Yayasan Pengembangan Mode Forum Budaya Indonesia, 1994; -Menerima penghargaan dari BPP GAPENSI di Surabaya, 1996 ■ **Penghargaan Bidang Pendidikan:** -Memperoleh penghargaan dari Lemhanas atas pengembangan buku-buku Perpustakaan Pustakalem, 1984; -Memperoleh penghargaan atas sumbangan tenaga dan pikiran dalam membantu Sekjen Wanhankamnas RI pada Rapat Koordinasi Pengumpulan dan Pengolahan Materi GBHN 1993 antara lembaga/tokoh masyarakat, lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pemerintah negara, dengan Sekjen Wanhankamnas atas pembangunan Perpustakaan SMA Negeri Narumonda, perbaikan lapangan bola dan jalan umum di Porsea, Tapanuli Utara, 1992; - Dinobatkan sebagai Tokoh Pendidikan dalam acara Men of The Year 1993-1994, karena dinilai turut mengembangkan dunia pendidikan di Indonesia, 1994; -Memperoleh penghargaan atas partisipasi pada Seminar Nasional peran perguruan tinggi swasta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menyongsong PJPT II, 1994 ■ **Pengalaman Organisasi:** -Bendahara BPD GAPENSI Provinsi DKI Jakarta, 1975; -Ketua I Perhimpunan Instalatif Air Minum Jakarta, 1979; -Anggota KADIN Jaya, 1981; -Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia, 1983; -Anggota Dewan Penyantun Badan Bantuan dan Perlindungan Hukum KADIN JAYA, 1983; -Ketua Umum Asosiasi Asphalt Beton Provinsi DKI Jakarta, 1984; -Anggota Dewan Penyantun Universitas Bukit Barisan Medan Sumatera Utara, 1984; -Bendahara Umum BPP GAPENSI, 1984; -Diangkat sebagai Staf Deputi Pembangunan Wanhankamnas, 1984; -Anggota Dewan Pembina Pusat APBP, 1985; -Ketua Departemen Evaluasi dan Analisa KADIN JAYA, 1985; -Ketua Umum BPD GAPENSI Provinsi DKI Jaya, 1985; -Anggota Dewan Pertahanan Keamanan Nasional Bidang Dunia Usaha dalam Pembangunan Nasional, 1985; -Anggota Dewan Penasehat BPP GAPENSI, 1986; -Ketua Bidang Aplikasi Sistem dan Teknologi, 1986; -Wakil Ketua Umum III BPP GAPENSI, 1989; -Dewan Kehormatan pada Munas GAPENSI di Yogyakarta, 1992; -Diangkat sebagai Tim Ahli Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, 1992; -Wakil Ketua Umum Badan Pertimbangan Tingkat Pusat GAPENSI, 1996 ■ **Alamat Kantor:** Jl. Angkur No.40-41 Pulo Mas, Jakarta Timur



Orang yang sudah punya karya, jikalau berbicara pasti akan didengar orang. Ungkapan itu dikemukakan oleh Bonar Simangunsong, tatkala memberikan gambaran apresiasinya yang tinggi terhadap ketokohan Kanjeng Pangeran Tarnama Sinambela di jagat pembangunan kelautan. Tarnama, pimpinan kelompok usaha kontraktor Grup Sumber Batu, sekaligus pendiri Yayasan Pendidikan Budi Murni yang salah satunya mengelola Universitas Mpu Tantular (UMT), diidentifikasi Bonar sebagai tokoh kelautan kontemporer berkat dedikasinya yang luar biasa bagus dengan mendirikan pusat-pusat pendidikan kelautan.

Fakultas Maritim yang dimiliki UMT, misalnya, salah satu dan yang langka dimiliki oleh semua universitas yang ada di Indonesia. Bahkan, demikian Bonar, Tarnama Sinambela masih akan bergerak lebih jauh lagi dengan rencana besarnya mendirikan Kota Mahasiswa Terpadu di lahan seluas 500 hektar di daerah Jonggol, Bogor, Jawa Barat dimana di situ akan didirikan Universitas Mpu Tantular dan Institut Kelautan Indonesia, pusat riset kelautan (*ocean research center*) bertaraf internasional, perpustakaan, asrama mahasiswa, danau buatan,

Ir. Drs. Bonar Simangunsong, SE, M.Sc

Laksamana Pertama TNI-AL (Purn) ini memiliki beragam gagasan untuk mengakselerasi pembangunan yang berorientasi kelautan, sebagai buah dari keinginannya untuk selalu belajar, melayani dan berbagi. Kisah hidupnya memang sangat diwarnai oleh proses belajar dan melayani, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Kini, di saat semua komponen bangsa ingin memiliki visi pembangunan kelautan, sosok Bonar Simangunsong sebagai pembelajar dan pelayan menjadi sangat diperlukan.

bioskop, pasar swalayan, pusat peribadatan dan beragam sarana dan prasarana perkuliahan mahasiswa.

Bonar yang dengan kerendahan hati begitu tepat mengapresiasi ketokohan orang lain, selain kepada Tarnama juga terhadap Prof. Dr. Ir. Rizald Rompas, M.Agr Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia (Dekin), serta Prof. Dr. Hasyim Djalal seorang pakar kelautan terkemuka berkali-kali internasional, itu menunjukkan kebesaran jiwa dan

Akselerasi Pembangunan Berorientasi Kelautan

pikirannya. Bonar Simangunsong yang hidup bersahaja sesungguhnya memiliki pula beragam pemikiran yang brilian yaitu bagaimana mengakselerasikan pembangunan yang berbasis-kelautan. Karena posisinya saat ini adalah Sekretaris Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) di Dewan Maritim Indonesia, maka, pemikiran-pemikiran visioner Bonar banyak tertuju kepada bagaimana warga bangsa Indonesia yang dicintainya ini bisa memiliki kemampuan untuk mengelola potensi kelautan Indonesia yang maha kaya ini.

Itu pula sebab Bonar sangat peduli sekali manakala mendengar gagasan Tarnama Sinambela ingin membangun sebuah Kota Mahasiswa Kelautan Terpadu, yang salah satu isinya kelak adalah berdirinya sebuah *ocean research center* bertaraf internasional, yang dapat dipersandingkan dengan *Maritime Institute* yang dimiliki negara Kanada, atau sekelas *Maritime Research Center* di negara lain. Bonar menyatakan keterusterangan dirinya begitu kagum akan gagasan Tarnama, sehingga gagasan itu harus didukung sebab mencerminkan adanya gandeng tangan antara pemerintah dan kalangan swasta dalam membangun pusat pendidikan tinggi di bidang kelautan.

Bonar menyebut posisi yang diambil Tarnama sudah pas dengan ide *re-inventing government* dalam pengelolaan sebuah negara modern, dimana pemerintah lebih mengambil peran sebagai pengarah atau *steering* saja. Sedangkan pelaksanaannya dipersilakan kepada peran serta masyarakat. "Artinya apa, pembangunan itu diberikan ke masyarakat. Itulah reformasi," kata Bonar.

"Kanjeng Pangeran Tarnama Sinambela, yang selama ini belum begitu kita kenal di dunia maritim, kini muncul dengan sebuah gagasan yang luar biasa. Kita perlu mendukung dan mendorongnya, supaya bukan hanya Kanjeng Pangeran Tarnama yang berbuat demikian. Tetapi juga pengusaha-pengusaha yang lain, agar ada lembaga pendidikan kelautan dari Sabang sampai Merauke di setiap jarak seribu kilometer, yang akan

mendidik anak-anak Indonesia supaya bisa menggunakan laut sebagai ruang hidup dan ruang juang," kata Bonar Simangunsong, seorang tokoh kelautan yang memiliki pemikiran orisinal dengan lontarannya menjadikan laut Indonesia sebagai ruang juang dan ruang hidup.

Ungkapan laut sebagai ruang juang dan ruang hidup bukan sesekali saja dilontarkan Bonar Simangunsong. Melainkan di setiap kesempatan, sampai-sampai ia dikenal sebagai pemilik ide orisinalnya. "Makna Deklarasi Djuanda bagi pembangunan Indonesia ini perlu diangkat ke permukaan supaya laut menjadi ruang hidup buat kita dan ruang juang. Jadi, bukan hanya sekedar berenang dan berlayar tapi kita bisa hidup dari laut kita yang kaya itu," kata Bonar, tatkala menghantarkan makalah Prof. Rizald Max Rompas di sebuah panel diskusi.

Gagasan besar Bonar Simangunsong mengakselerasi pembangunan nasional berbasis-kelautan, dengan membangun industri pendidikan kelautan yang berdaya saing tinggi, muncul sebagai buah apresiasinya yang sedemikian tinggi terhadap kepeloporan Insinyur Haji Djuanda tatkala mencetuskan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957.

Ketika memandu sebuah acara panel diskusi yang dihadiri para wartawan ibukota di Jakarta, dalam rangka memperingati 50 Tahun Deklarasi Djuanda, Bonar mengatakan diskusi digelar agar segenap komponen bangsa semakin menyelami betapa pentingnya Deklarasi yang sudah berusia 50 tahun itu.

"Laut kita mempunyai potensi 150 miliar dolar AS per tahun, itu yang diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Freddy Numberi dalam salah satu ceramahnya. Cukup besar, tapi tidak bisa kita manfaatkan karena tidak dibangun. Dengan diskusi ini bagaimana membangun itu, justru untuk mempercepat pembangunan," kata Bonar gemas, sebab ingin sesegera mungkin mengakselerasi segenap potensi kemampuan bangsa supaya bergerak ke lautan luas.

PROFIL

Kata Bonar, Indonesia sangat menghargai jasa Djuanda sehingga setiap tanggal 13 Desember, pada tahun 2001 ditetapkan oleh Presiden RI sebagai Hari Nusantara. Deklarasi Djuanda telah menjadikan laut Indonesia sebagai *solid continuous*, menjadi satu, dimana tidak ada lagi satu titik pun di Indonesia ini yang menjadi milik internasional. Sebab sebelum Deklarasi Djuanda disetujui dunia, tepatnya sebelum tahun 1992 dunia internasional masih berhak menggunakan laut Indonesia secara bebas.

Dimulai 1993

Bonar Simangunsong mengatakan, Indonesia mulai membangun laut sejak tahun 1993 tatkala sektor kelautan dimasukkan dalam GBHN tahun 1993, yang salah seorang penyusunnya di dalamnya adalah Bonar Simangunsong dan Tarnama Sinambela. Ketika itu keduanya sedang berkuat di Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wan Hankamnas).

Pencapaian tersebut sudah dianggap lumayan pada saat itu, kendati kelautan justru terkesan "dikerdilkan" sebagai sektor, dari seharusnya bidang pembangunan kelautan yang di dalamnya terdapat unsur perikanan, pariwisata, pelayaran, dan maritim.

Demikian pula pada tahun 1996, dalam Konvensi Nasional tentang Maritim di Makassar dinyatakan bahwa Indonesia adalah benua maritim karena negara ini memiliki unsur-unsur benua. Pada saat itu dinyatakan bahwa Indonesia bukan terdiri pulau, melainkan terdiri dari laut yang ditaburi pulau-pulau. "Jadi paradigmanya laut, bukan pulau," kata Bonar.

Mengeluti laut bukanlah hal baru bagi Bonar Simangunsong. Pria kelahiran Medan, 24 November 1938 ini adalah pensiunan Laksamana Pertama TNI AL di tahun 1993 di usia 55 tahun, yang kemudian pensiun sebagai pejabat Eselon-1 di pemerintahan pada usia 60 tahun di tahun 1998, di Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wan Hankamnas), serta Widyaiswara di LAN, Diklat SPATI dan SPAMEN.

Bonar adalah sosok manusia yang selalu ingin belajar. Kisah hidupnya sangat diwarnai proses belajar. Baginya belajar adalah sebuah proses yang terjadi sepanjang hidup. Ia memang menggecap sejumlah pendidikan di dalam dan luar negeri. Keinginannya untuk terus belajar merupakan sebuah kerinduan supaya dapat berguna mem-

bangun kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Sesuai menamatkan pendidikan SMA 3B di Setiabudi, Jakarta Selatan, Bonar melanjutkan ke ITB Bandung. Baru menginjak kuliah tingkat tiga Bonar menerima tawaran beasiswa perkuliahan dari TNI-AL, yang tiga bulan kemudian berlanjut lagi datang tawaran untuk menjadi Pelajar Calon Perwira TNI-AL. Sebagai pelajar calon perwira, di dalamnya sudah termasuk pula kesempatan untuk kuliah di luar negeri, yakni Uni Soviet. Pada tahun 1967 Bonar akhirnya lulus kuliah dan menyandang gelar Ir dan Master of Science (M.Sc) dari Odessa Polytechnical Institute, Uni Soviet.

Sekembali dari "negeri beruang merah" itu Bonar lantas diterima sebagai perwira Letnan Satu di TNI-AL, dan sambil mengajar di Universitas Trisakti, Jakarta.

Pada tahun 1974, kembali Bonar berkesempatan menempuh pendidikan komputerisasi yang disebut *Special Computer Training* dan pada tahun 1986 di Manajemen Pertahanan Internasional IDMC (*International Defence Management Course*), terletak di Monterey, California, Amerika Serikat. Pada saat itu Bonar sedang mengajar pula sebagai dosen di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta.

Bonar dikenal sebagai salah satu tokoh dan pionir komputerisasi di lingkungan TNI Angkatan Laut dan Dephankam. "Semua itu adalah bekal untuk melayani negara dan sesama," ungkap suami dari Elizabeth Liestriana Siahaan ini. Tapi yang lebih penting dari semua itu, bagi Bonar masa pendidikan di Amerika adalah masa pencerahan tersendiri untuk semakin mencintai bangsa dan negaranya.

Setelah mengabdikan lebih dari sepuluh tahun di lingkungan TNI-AL Bonar berkesempatan menyandang pangkat Letnan Kolonel (Letkol). Pada posisi ini ia kembali memperoleh kesempatan pendidikan dari Dephankam, belajar ke lembaga pendidikan staf dan kepemimpinan AACS (The Australian Administrative Staff College), 1980 yang demikian bergengsi di Negeri Kanguru Australia. AACS dikenal dengan lulusannya yang merupakan orang-orang terbaik di bidangnya.

Empat tahun setelah itu Dephankam kembali memberi Bonar kesempatan mengikuti pendidikan SESP (1984), dan lulus sebagai peringkat pertama.

Akumulasi pendidikan AACS, SESP dan pendidikan lain sebelumnya berhasil membentuk

sosok dan kepribadian Bonar sebagai perwira profesional yang memiliki wawasan kebangsaan dan internasional.

Kisah pendidikan yang dijalani Bonar masih beragam, diantaranya menyelesaikan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara-Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN), dan Universitas Terbuka (UT).

Beragam pendidikan dan puluhan tahun pengalaman hidup yang ditempuh, ditambah posisinya sekarang sebagai Sekretaris Bidang Sumber Daya Manusia Dewan Maritim Indonesia, memberikan Bonar Simangunsong kesimpulan bahwa Indonesia harus melakukan perubahan budaya dengan mengangkat kembali kepeloporan nilai-nilai budaya bahari yang unggul.

Nilai-nilai budaya bahari itu menurut Bonar adalah cermin dari keberanian kita menghadapi berbagai tantangan alam kelautan yang dinamis, dan interaksi sosial-ekonomi dan politik dengan berbagai bangsa lainnya di dunia. Pengangkatan nilai-nilai adalah untuk mewujudkan visi kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh, mandiri, sejahtera, maju dan disegani.

Bonar sangat mengidamkan berdirinya pusat-pusat pendidikan dan riset kelautan tropis di Indonesia sebagai *center of excellences* di dunia. Hal itu dimaksudkan pula untuk mengentaskan sebagian besar penduduk Indonesia, yakni sebanyak 160 juta atau hampir 60 persen dari seluruh penduduk yang kini hidup di wilayah pesisir dengan aneka keterbatasan infrastruktur, fasilitas umum maupun fasilitas sosial.

Bonar berpesan kepada para elit politik, petinggi birokrasi, dan masyarakat umum supaya memahami Konsep Wawasan Nusantara dan Wawasan Bahari. Jika itu dipahami maka niscaya kebijakan umum pembangunan nasional, serta perilaku masyarakat dalam akselerasi pembangunan negara bangsa pasti akan sesuai dengan jati diri, geografi, dan geopolitik kita sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia.

Pesan tersebut agaknya harus didengar agar tujuan bersama akselerasi pembangunan berorientasikan kelautan dapat segera terwujud. ■ [ti \(www.tokohindonesia.com/bonar-simangunsong\)](http://www.tokohindonesia.com/bonar-simangunsong)

Tian Son Lang, Haposan Tampubolon dan Marjuka Situmorang

BIODATA:

Nama:

Bonar Simangunsong

Lahir:

Medan, 24 November 1938

Jabatan:

-Sekretaris Bidang Sumber Daya Manusia,
Dewan Maritim Indonesia

Pangkat:

Laksamana Pertama TNI (Purnawirawan)

Istri:

Elizabeth Liestriana Siahaan, SE

Pengalaman Kerja:

-Pejabat Eselon-1 Wanhankamnas
-Wdyaiswara, LAN, Diklat SPATI dan SPAMEN
-Direktur Lembaga Pendidikan Politik Negara (LPPN)

Pendidikan Umum:

-SMA 3B Setiabudi, Jakarta Selatan
-ITB Bandung, hingga Tingkat III
-Sarjana Teknik Radio (Ir dan M.Sc), Odessa Polytechnical Institute, Uni Soviet, 1967
-Sarjana Ilmu Administrasi (Drs), STIA-LAN, Jakarta, 1995
-Sarjana Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Terbuka, Jakarta, 2001
-The Australian Administrative Staff College, Australia

-Sespa Departemen Perhubungan, Jakarta

Pendidikan Militer:

-Sesdaspa, TNI-AL
-Special Computer Training, di Naval Postgraduated School, Monterey, California, AS
-International Defence Management Course (IDMC), Monterey, California, AS

Kursus-Kursus:

-Computer Programming and System Abalyst, IBM, Jakarta
-Network Planning, Departemen PU
-Feasibility Study, Usakti, Jakarta
-Manajemen Litbang, LIPI, Jakarta

Penataran:

-P-4, TNI-AL
-Tarpadnas
-Penataran Karyawan ABRI Pusat/Daerah
-Penataran P-4 Tingkat Nasional Angkatan XIV

Alamat Rumah:

Jalan Melur 14, Kompleks TNI-AL, Pangkalan Jati, Jakarta Selatan

Wawancara Prof. Dr. Hasjim Djalal

Pikirkan **Indonesia** 50 Tahun Ke Depan

Kepeloporan Perdana Menteri Insinyur R. Haji Djuanda Kartawidjaja, yang memaklumkan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 sebagai klaim sepihak bahwa Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*), yang dianggap melanggar hukum-hukum internasional yang sedang berlaku pada saat itu sehingga memperoleh tentangan dari banyak negara besar, sudah menjadi catatan khusus dalam sejarah emas perjalanan bangsa Indonesia.

Djuanda tak sempat menyaksikan bagaimana gagasannya menjadi sebuah kecenderungan internasional terutama bagi negara-negara kepulauan di seluruh dunia. Sebab tak lama kemudian, pada 7 November 1963 dia meninggal dunia.

Tetapi ternyata ada dua tokoh bangsa yang kemudian gigih melanjutkan cita-cita Djuanda, untuk memperjuangkan Deklarasi Djuanda sebagai ketetapan hukum di jagat internasional. Keduanya merupakan pakar hukum laut internasional, yakni Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan Prof. Dr. Hasjim Djalal.

Setelah dimaklumkan pada tahun 1957, barulah 25 tahun kemudian bangsa-bangsa di dunia bersedia mengakui klaim Indonesia sebagai negara kepulauan, setelah ditetapkan Konvensi kedua PBB tentang Hukum Laut atau *2th United Nation Convention on the Law of the Sea*, pada tahun 1992.

Cukupkah sampai di situ? Ternyata belum. Kedua pendekar hukum laut internasional yang dimiliki Indonesia masih harus bergerilya ke banyak negara, melobi para kepala pemerintahan dan kepala negara-negara sahabat agar bersedia meratifikasi UNCLOS 1982, sebagai syarat kemutlakan pemberlakuannya di seluruh dunia.

Faktanya, baru pada tahun 1994 UNCLOS diterima menjadi hukum internasional setelah 60 negara bersedia meratifikasinya.

Di tahun 2007 sudah 50 tahun Deklarasi Djuanda melegenda. Tetapi visi sesungguhnya untuk menyatukan Indonesia di segala aspek kehidupan, justru semakin mengarah ke kemunduran. Para pemimpin bangsa yang pernah berkesempatan menjadi pimpinan nasional, sesungguhnya memiliki *milestones* tersendiri dalam merealisasi “mimpi” Djuanda. Tetapi hasilnya tetap saja belum maksimal.

Upaya terbaru yang terlihat adalah penggalangan 16 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu untuk duduk bersama dalam satu meja bundar menggelar *National Ocean Summit* di Jakarta pada hari Selasa 4 Desember 2007, supaya sepaham untuk melakukan percepatan pembangunan kelautan pada aspek ekonomi, lingkungan hidup, sumber daya manusia dan iptek dan kelembagaan. Bahkan, pada Mei 2009 Indonesia akan berkesempatan menjadi tuan rumah pertemuan para kepala negara dan pemerintahan dari 146 negara di dunia, serta para cendekiawan dan *stakeholder* lainnya, yang menggelar *World Ocean Conference* di Manado, Sulawesi Utara.

Melihat fakta kekinian setelah Deklarasi Djuanda dicetuskan 50 tahun yang lalu, sesungguhnya terbersit, apa yang akan terjadi dengan masa depan Indonesia 50 tahun yang akan datang. Sebuah pertanyaan yang menggelitik karena lambannya bangsa ini memanfaatkan potensi kelautan yang dimiliki. Berikut petikan wawancara *Hapsan Tampubolon* dan *Saut Situmorang* dengan Prof. Dr. Hasjim Djalal, Penasehat Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang memiliki kapabilitas sebagai pakar hukum kelautan internasional di mana di sepanjang kiprahnya gigih memperjuangkan kepentingan kelautan Indonesia di forum-forum dunia.

Bapak Hasjim Djalal dikenal sebagai tokoh hukum laut internasional yang gigih melakukan lobi-lobi tingkat dunia untuk memperjuangkan visi



Prof Dr Hasjim Djalal, tokoh hukum laut internasional ■ mti/ht

kelautan kita. Bapak bisa menjelaskan, bagaimana posisi terbaru Indonesia di sisi geopolitik dan geostrategis dunia?

Posisi strategis Indonesia sudah sangat banyak diketahui bahwa kita sangat penting. Dalam arti letak perairannya berada di antara dua samudra dan dua benua. Susah mencari negara di dunia yang memiliki posisi seperti itu.

Permasalahan yang dihadapi bangsa kita sejak dahulu, sudah berlangsung ratusan tahun, yang pandai memanfaatkan posisi itu justru orang luar. Sampai hari ini kita tidak mampu mengambil keuntungan dari posisi yang sangat strategis itu. Yang pandai dan mampu adalah Singapura.

Singapura dalam posisi di tengah jalan mampu mengembangkan industrinya, perkapalannya dan segala macam. Kita kelihatannya belum mampu, padahal memiliki unsur-unsur yang sangat strategis. Tidak ada orang yang bisa lewat dari Samudera Hindia ke Samudera Pasifik tanpa melalui kita, atau dari Pasifik ke Hindia.

Itu satu poin. Yang kedua, walau keadaan kita sangat strategis, besar, banyak, dan kaya, Singapura tidak mempunyai *resources* karena dia kecil, tetapi karena kita kurang pandai memanfaatkan alam maka banyak dicuri orang. Sejak jaman penjajahan sudah begitu, sampai sekarang masih seperti itu juga. Kekayaan alam kita banyak tetapi tidak mampu memakmurkan rakyat.

Yang ketiga, karena kita besar, kekayaan alam banyak, akhir-akhir ini terasa kita lebih banyak merusak daripada memanfaatkannya. Seperti hutan yang hancur, laut kita juga sudah rusak. Sekarang kita menghadapi terumbu karang yang rusak. Karena tidak paham, kita menganiaya alam. Maksudnya mungkin tidak untuk menganiaya, tapi begitulah yang terjadi.

Permasalahannya pada ketidakmampuan atau desain pembangunan kita salah?

Kita kurang mampu. Tapi ada faktor lainnya, faktor kekuatan juga faktor kelemahan. Kelemahan ini masih kurang kita pahami.

Kelemahan pertama, kita negeri kepulauan yang mempunyai pantai, laut dan poros. Poros artinya laut

yang “berlobang-lobang”, yang bisa dimasuki orang lain. Oleh karena itu, kita melihat kejahatan terjadi tanpa mampu kita kontrol. Ada pabrik narkoba terbesar di dunia yang letaknya di celah-celah pantai selatan laut Jakarta. Sulit membayangkan di negeri yang jutaan penduduknya orang bisa membuat pabrik narkoba.

Yang kedua, dari semula kita sudah mengatakan kemakmuran hanya bisa kita capai melalui persatuan. Kesatuan dan persatuan adalah tema utama Indonesia sejak merdeka. Sejak jaman kolonial kita tidak ada kesatuan dan persatuan. Dengan demikian orang luar yang datang ke negeri ini dengan gampangnya mengadu-domba. Bukan kita yang bersatu menghadapi orang luar, tapi orang luar memanfaatkan posisi kita, kedudukan kita, dan kekayaan alam kita. Dulu pulau ini bertengkar dengan pulau ini, etnis ini dengan etnis ini berkelahi.

Kita berusaha menghilangkan itu lewat Deklarasi Djuanda. Tapi bangsa ini lupa dengannya. Sebentar kemudian mulai lagi berkelahi. Pertentangan banyak sekali antar pulau, antar suku, antar agama. Selalu ada yang berkecamuk. Kita kurang sadar hal itu tidak bisa menumbuhkan kekuatan. Tetapi justru menumbuhkan kelemahan. Inilah yang jaman dulu dipakai oleh Belanda.

Sampai sekarang, metode adu domba masih berlangsung?

Masih. Walaupun sekarang saya tidak tahu siapa yang menghasut. Tetapi dimana-mana orang kita masih bertengkar.

Menurut penilaian Bapak selaku sesepuh bangsa, isi Deklarasi Djuanda secara kejiwaan apakah sudah tercapai?

Secara visi kejiwaan itu bagus. Tapi keresapan kejiwaan itu yang sejak dulu sudah pahit, sampai sekarang ada gejala sudah tidak baik. Sekarang sudah dikembangkan lagi dengan sistem yang baru yang belum tentu juga mulus. Cuma cara pengembangannya kita belum memahami sehingga pertentangan menonjol-nonjol lagi.

Dalam bentuk apa dia menonjol, semangat keadaraan yang berlebih-lebihan, semangat keagamaan satu dengan yang lain saling bertengkar, semangat kesukuan begitu juga. Padahal itu yang selama ini mulai kita tenangkan.

Sekarang antar pulau mulai merasa aneh dan merasa lain. Padahal Deklarasi Djuanda mencoba untuk mempersatukan pulau-pulau. Laut dianggap sebagai penghubung.

Adakah Deklarasi Djuanda mengandung visi

ekonomi?

Ada, visi ekonominya. Sekarang, tanya saja kepada kawan-kawan, apakah visi ekonomi pertumbuhan yang besar dapat terjadi dengan perpecahan yang mengecil-engecil.

Setahu saya, sewaktu masih sekolah, *economic size* sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Misalnya di sini ada perusahaan-perusahaan kecil. Kalau dia mau menjadi besar harus bersatu. Tapi yang terjadi di Indonesia tidak itu. Perusahaan yang besar dibagi-bagi. Jadi secara teoritis *economic size* membawa pertumbuhan. Kita justru ke arah pengecilan-pengecilan dalam istilah pemekaran.

Contohnya, Eropa Barat dulu secara keseluruhan pecah tapi sekarang bersatu. Malah Eropa Timur ada yang masuk sehingga terdapat 25-26 negara bersatu dalam Uni Eropa. Kita satu negara yang dulu hanya 27 provinsi, sekarang entah sudah berapa provinsi. Yang kabupatennya dulu puluhan sekarang mungkin sudah ratusan.

Dari segi pemanfaatan ekonomi sumber daya alam laut, bagaimana komentar bapak?

Kalau *resources*-nya dikembangkan dengan cara membagi-bagi tentu *economic size*-nya akan hilang. Padahal misinya siapa yang paling mampu mengerjakan. Hasilnya saja yang bisa dibagi-bagi. Tapi kalau prosesnya yang dibagi-bagi, susah.

Sama dengan orang yang kerja keras mati-matian tumbuh dari bawah hingga menjadi besar dan kaya raya. Tetapi begitu bapaknya yang kaya meninggal tidak diteruskan, karena anak-anaknya bagi-bagi warisan. Anak yang membagi-bagi ini menjadi kecil-kecil padahal bapaknya sudah membesarkannya. Bagaimana si anak yang kecil-kecil bisa tumbuh menjadi besar, kalau modalnya tidak lagi besar.

Dulu kita negara kecil sebab pernah berbentuk federal dan segala macam. Tahun 1949 pecahlah PRRI/Permesta. Pak Djuanda bilang satu, dan dijadikannya satu sehingga kita menjadi besar kembali. Tetapi sekarang mulai dipotong lagi di sana sini.

Lemahnya pemanfaatan nilai ekonomis kelautan dapat diartikan kita belum berdaulat secara ekonomis?

Justru karena kita memotong-motong itu. Banyak asas-asas yang belum jalan. Pengelolaan *resources* perikanan, misalnya. Sekarang laut dibagi sekian mil untuk daerah ini sekian mil untuk daerah itu. Akibatnya pengelolaan laut secara utuh menjadi sulit. Padahal seluruh dunia sekarang berbicara mengenai pengelolaan yang berbasis ekosistem demi menjaga sustain-

nabilitasnya. Ekosistem tidak berdasarkan bagi-bagi wilayah. Ekosistem berdasarkan *resources*, dia tidak tahu batas wilayahnya.

Kalau begitu, persoalan apa sesungguhnya sedang dihadapi bangsa ini di lapangan?

Rasa kesatuan yang dulu kita tonjokkan dan perjuangan sekarang menjadi berkurang. Dulu pejuang kemerdekaan mempunyai cita-cita untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekarang lain, saya dulu, kepentingan daerah saya dulu. Mental pejuang kemerdekaan kita dulu, Indonesia yang penting makmur, masuk penjara pun mau kalau perlu dibuang pun mau. Idealisme berpikirnya jangka panjang. Sekarang tidak begitu lagi. Pokoknya saya terpilih dulu lima tahun setelah itu terserah Tuhan.

Jika demikian masihkah relevan Deklarasi Djuanda?

Menurut saya sangat relevan sekali. Sebab eranya bisa berubah tapi persoalan pokoknya masih tetap sama. Kalau kita melupakan esensi pokoknya kita celaka. Deklarasi Djuanda ide pokoknya mempersatukan bangsa. Beliau tidak melihat laut Jawa, Sulawesi, Maluku sebagai laut bebas. Tidak gampang memperjuangkan itu. Seluruh dunia ketika itu memprotes. Tapi beliau melihat itu sebagai salah satu yang harus diperjuangkan dengan sabar, dan bertahun-tahun. Itu dari sisi kesatuan bangsa.

Dari segi lain, *resources*, Deklarasi Djuanda pada dasarnya memperluas kekayaan alam Indonesia untuk keperluan bangsa Indonesia

Menurut Bapak, bagaimana meredefenisi Deklarasi Djuanda?

Cerita saja panjang lebar kepada para pemimpin kita. Saya yakin pemimpin kita sadar kegunaannya yaitu untuk kesatuan bangsa, pembangunan bangsa, dan memperluas sumber daya alam. Tapi mereka kemungkinan tergodanya dengan kepentingan-kepentingan jangka pendek sehingga tidak menekankan jangka panjang.

Aktualisasi Deklarasi Djuanda yang visioner itu masih jauh ke depan. Makanya saya sedang mikir-mikir, pada tahun 1945 kita memproklamkan kemerdekaan dengan wilayah nasional sebagaimana dimiliki Hindia Belanda 3 mil dari pantai, sehingga laut-laut itu bukan laut nasional kita. Tetapi Djuanda menjadikannya menjadi laut nasional. Itu sangat visionaris.

Coba kita pikirkan. Setelah 50 tahun Deklarasi Djuanda, ke mana bangsa kita mau pergi. Pada tahun 1957 penduduk Indonesia masih sekitar 80 juta jiwa, sekarang 240 juta jiwa. Untuk 50 tahun yang akan

datang ke mana mau kita bawa lagi bangsa ini. Djuanda dulu membawanya kepada Kesatuan Nusantara.

Nanti setelah kekayaan alamnya habis, demikian pula hutannya, ikannya, terumbu karangnya, pemikir-pemikir kita sudah harus mulai belajar dari Pak Djuanda untuk memikirkan masa depan bangsa 50 tahun yang akan datang.

Jika demikian halnya, kebijakan apa yang harus diambil bangsa Indonesia?

Kita inventarisir kekayaan laut kita, seperti ikan. Ikan tidak bisa berkembang kalau tidak *sustainable*. Kalau ikan terlalu banyak diambil, kalau diambil telurnya, anaknya, maka dia tidak bisa berkembang. Karena itu harus ada cara-cara pengambilan ikan yang benar.

Merupakan isu besar di dunia perikanan menjamin sustainability sehingga anak-anak tidak diambil, ikan yang sedang bertelur tidak diambil. Bagaimana mengambil ikan pada waktu yang tepat, jumlah berapa boleh diambil.

Perikanan harus dikaitkan dengan yang lain. Beda dengan mineral di situ saja dia. Sedangkan ikan lari. Banyak ikan di Pasifik, Samudra Hindia, bertelurnya di Indonesia setelah itu keluar lari ke Afrika atau kemana-mana.

Harus ada kemampuan kita mengelola perikanan secara regional dan internasional. Kita harus ikut aktif dalam RFMO, *Regional Fisheries Management Organization*. Di sekeliling kita ada organisasi itu. Celakanya Indonesia tidak ikut. Alasannya tidak punya duit.

Secara khusus mengenai Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang menjadi penghela kemayaan kelautan dan perikanan kita tetapi anggarannya hanya Rp 3,5 triliun. Apa komentar Bapak?

Departemen ini sudah capek teriak-teriak. Sekarang kan model demokrasi, reformasi, tidak boleh satu departemen saja ambil kebijakan. Jadi harus terkait dengan departemen lain. Itu tadi, baru satu masalah ikan. Kemarin di Cilacap penangkapan ikan turun menjadi 80 persen karena alam.

Kedua sumber daya migas, timah dan lain-lain. Yang saya pertanyakan, apa dan berapa nilainya serta dimana kekayaan mineral dasar laut itu berada. Di perut bumi yang kita tahu cuma migas karena itu cepat menghasilkan duit. Tapi tidak tahu dimana ada emas, berlian dan sebagainya. Timah, kita tahu ada di perairan Bangka Belitung, Pulau Singkep. Di tempat-tempat lain apa lagi yang ada. Itu, prospek masa depan yang sekarang belum kita ketahui benar.

Peluang mengelola sumberdaya alam cukup



Prof Dr Hasjim Djalal dan Bonar Simangunsong ■ mti/ht

besar, mengapa kebijakan umum kita belum mengarah ke sana ?

Kalau mineral bukan unsur DKP, tetapi departemen lain. DKP hanya ikan, kalau tambang urusan lain lagi. Yang sudah diketemukan adalah migas, tapi sudah hampir habis, bahkan kita sudah net importir sekarang.

Yang ketiga, mencari energi dari laut, misalnya memanfaatkan arus laut untuk membangkitkan listrik, memanfaatkan ombak untuk listrik. Di Sumbawa, pernah dicoba memanfaatkan OTEC, *Ocean Thermal Energy Conversion*. Jadi, perbedaan suhu air di udara dengan air di bawah kalau disalurkan bisa membangkitkan listrik. Pernahkah dipikirkan memanfaatkan

ombak yang begitu banyak, seperti di pantai Utara Jawa pasang naik pasang surut.

Mungkin ketersediaan sumber daya manusia kita yang berorientasi ke laut masih sangat kurang ?

Mungkin juga. Saya berpikir, filosofi pembangunan kita berbeda dengan negara lain. Contoh Cina, menjadi negara besar yang cepat maju dengan cadangan devisa 1,2 triliun dollar AS. Dasar pembangunan Cina berpegang pada ajaran Mao Tze Tung pada tahun 1970, atau 30 tahun yang lalu.

Empat pokok pembangunan Cina adalah modernisasi pertanian; modernisasi industri; mempunyai *science and technology*; dan modernisasi pertahanan. Mereka tidak pernah

mikirkan laut selama zaman Mao Tse Tung. Yang dipikirkan adalah darat dengan *long march*-nya. Barulah setelah Mao meninggal, Cina mengembangkan visi kelautan.

Modernisasi apa yang kita lakukan? Dulu, pernah ada penghargaan dari FAO. Sekarang di mana pertanian kita? Perindustrian kita pernah disebut "Macan Asia", setelah reformasi kemudian hilang. *Science and technology* di era Habibie disebut teknologi lompat katak, kalau jalan terus tidak sampai-sampai sehingga melompat-lompat.

Mungkin, kita perlu mereview filosofi pembangunan jangka panjang yang menjadikan Wawasan Nusantara sebagai basis. Di sinilah saya menghargai Deklarasi Djuanda itu.

Menurut Bapak, berarti, dalam konteks itu sangat diperlukan kehadiran perguruan tinggi kelautan seperti Institut Kelautan Indonesia?

Ya, sesungguhnya dari dulu saya sudah bicara mengenai hal itu tetapi tidak jadi-jadi juga. Sekarang pendidikan tinggi berserak. Dalam arti perikanan lain, pertambangan lain, satu sama lain tidak ada hubungannya. Menurut saya harus ada visi yang jelas berpikir masa depan yang jauh. Kita harus berpikir mengenai bangsa dan negara ini secara keseluruhan. Sebab itulah tema pokok Deklarasi Djuanda. ■ ti

(www.tokohindonesia.com/hasjim-djalal)

Pewawancara:

Haposan Tampubolon, Saut Situmorang dan Amron

Nama:
Prof Dr Hasjim Djalal
Lahir:
Sumatera Barat, 25 Februari 1934
Pendidikan:
MA (1959) dan Ph.D (1961) dari University of Virginia
Jabatan:
- Anggota Dewan Maritim Indonesia
- Penasehat Senior Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Karir:
Mantan diplomat di Deplu dan Dubes RI di beberapa negara
Karya (buku), al:
Indonesian Struggle for the Law of the Sea (1979) dan Indonesia and the Law of the Sea (1995)

B E R I T A MARITIM

I N D O N E S I A



BeritaMaritim.Com
MaritiMIndonesia.Com

TEMPAT PENDAFTARAN DAN PERKULIAHAN PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS MPU TANTULAR

KAMPUS A:

Jl. Cipinang Besar No.2 Jakarta Timur 13410
Telp. 021 - 856 2011, 819 7386, 850 6707
Fax. 021 - 856 2010

KAMPUS B:

Jl. Puri Kembangan No.2, Kedoya Jakarta Barat
Telp. 021 - 581 9779 Fax. 021 -583 01125

KAMPUS C:

Jl. Cipinang Besar No.2, Jakarta Timur 13410
Telp. 021 - 851 6260
Fax. 021 856 2010

Website: www.mputantular.ac.id

E-mail: pps@mputantular.ac.id

WAKTU KULIAH PAGI DAN MALAM
RUANG KULIAH FULL AC



Meraih Sukses Masa Depan Lebih Baik

UNIVERSITAS MPU TANTULAR